PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN INFLASI TERHADAP PENGANGGURAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi Program Studi Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

OLEH :

ISMAIL

3218.157

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

1444 H/2022 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Ismail NIM 3218157** dengan judul **"Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat",** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 28 Oktober 2022
Pembimbing

Amsah Hendri Doni, SE,.ME
NIDN. 2001028702

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	Ismail
Nim	:	3218157
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Bukitinggi/ 19 April 1999
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	:	Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul diatas adalah **BENAR** asli karya tulis penulis. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar sarjana penulis di copot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 28 Oktober 2022

Penulis

Ismail
NIM. 3218.157

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat.**" yang disusun oleh **Ismail** dengan Nim **3218157** Jurusan S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Syeh. M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Latar belakang masalah dalam penelitian ini yaitu Berdasarkan dari data yang ada secara teori jika jumlah penduduk meningkat maka pengangguran juga meningkat, namun dari data yang dianalisa selama 30 tahun terakhir di provinsi Sumatera Barat (dari data BPS). Jumlah penduduk meningkat tetapi pengangguran berkurang yang mana hal ini tidak sesuai dengan teori seperti pada data tahun 2006 - 2008. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengalisis seberapa besar pengaruh Jumlah penduduk dan inflasi terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Barat.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan variabel Jumlah Penduduk (X_1), dan Inflasi (X_2) dan variabel Pengangguran (Y). Data yang digunakan adalah data sekunder dari BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 1992 – 2021. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Uji asumsi klasik yang meliputi Uji Autokorelasi, Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, dan Uji Heteroskedastisitas. Uji Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi (R square), Uji Hipotesis t dan Uji Hipotesis f.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) variabel jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Barat, dimana nilai sig. 0,352 > 0,05 dan t tabel < t hitung (-0,946 < 2,056). Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami peningkatan disetiap tahun nya, adanya kebiasaan merantau masyarakat Provinsi Sumatera Barat sehingga pengangguran di daerah asal berkurang dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat yang relatif baik sehingga mampu menyerap tenaga kerja. ; 2) variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Barat, dimana nilai sig. 0.018 < 0,05 dan nilai t hitung > t tabel (2,517 > 2,056) ; 3) variabel Jumlah Penduduk dan Inflasi secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Barat, dengan nilai sig.0,001 < 0,05 dan f hitung > f tabel (9,010 > 3,35) dan nilai R Square sebesar 0,400 atau 40%. Sedangkan sisanya sebesar 60% variabel pengangguran (Y) dipengaruhi oleh variabel independent lain diluar penelitian ini, seperti pertumbuhan ekonomi, upah dll.

Kata Kunci: ***Jumlah Penduduk, Inflasi dan Pengangguran***.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT dengan limpahan rahmat dan karuniannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Kemudian Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dua pedoman hidup yaitu Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam. Adapun judul skripsi ini adalah **"Pengaruh Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat".**

Keberhasilan penyusunan skripsi ini juga atas bantuan dari berbagai pihak. Banyak kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam pembuatan skripsi ini, tetapi dengan semangat, kegigihan, bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Namun penulis menyadari bahwa masih ada banyak kekurangan dari Skripsi ini sehingga penulis membutuhkan Kritik dan Saran yang bersifat membangun dalam kemajuan pendidikan dimasa yang akan datang.

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada Ayahanda tercinta **Syafril** dan Ibunda tersayang **Nelisma** yang selalu mendoakan dan memberi nasehat serta dukungan yang tiada hentinya sehingga

menjadi alasan utama penulis tetap semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini, Semoga Allah SWT selalu melindungi beliau.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasihkepada:

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bukittinggi.
3. Ibu **Rika Widianita, SE., ME**, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam UIN Bukittinggi.
4. Ibuk **Baginda Parsaulian, ME**, Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal proses kuliah hingga semester akhir.
5. Bapak **Amsah Hendri Doni, SE, ME** selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya ditengah-tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan dan arahan serta masukan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Staff Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan S1 Ekonomi Islam khususnya Ekonomi Islam Lokal E angkatan 2018 atas kebersamaan, motivasi, kekompakan, kehebohan, dukungan serta semangatnnya.
8. Teman-teman seperjungan di kos yang telah mensuport dan memberikan

solusi dan semangat dalam proses pembuatan Skripsi ini.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan kasih sayang yang begitu luar biasa.

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih. Semoga mendapat ridho dan balasan pahala dari Allah SWT dan semoga karya ilmiah Skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin Ya Rabbal „Alamin.

Bukittinggi, 28 Oktober 2022

Penulis

Ismail
NIM. 3218157

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi Masalah 8

C. Rumusan Masalah 8

D. Tujuan Penelitian 8

E. Kegunaan Penelitian 9

F. Penjelasan Judul 10

BAB II LANDASAN TEORI 12

A. Pengangguran 12

1. Defenisi Pengangguran 12

2. Jenis Jenis Pengangguran 13

3. Teori Pengangguran 16

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pegangguran 17

1. Jumlah Penduduk 17

2. Pertumbuhan Ekonomi 24

3. Inflasi 32

4. Upah Minimum Provinsi 36

C. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pengangguran 42

D. Hubungan Inflasi dengan Pengangguran 43

E. Pengangguran, jumlah penduduk dan inflasi dalam pandangan Islam 45

1. Pengangguran dalam perspektif islam 45

2. Jumlah Penduduk dalam perspektif Islam 49

3. Inflasi dalam perspektif Islam 49

F. Kajian Terdahulu 53

G. Kerangka Pemikiran 56

H. Hipotesis 57

BAB III METODE PENELITIAN 59

A. Jenis Penelitian 59

B. LokasiPenelitian 59

C. Jenis dan Sumber Data 59

D. Variabel Penelitian 60

1. Variabel Terikat (*dependent variabel*) 60
2. Variabel Bebas(IndependentVariabel) 60
E. Teknik Pengumpulan Data 61
1. Observasi 61
2. Dokumentasi 62
F. Teknik Analisis Data 62
1. Uji Asumsi klasik 63
2. Uji Regresi Linear Berganda 64
3. Uji Koefisien determinasi (R^2) 65
4. Uji Hipotesis 65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 68
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 68
1. Profil Daerah Sumatera Barat 68
2. Visi dan misi Sumatera Barat 71
B. Hasil Analisis Data 71
1. Hasil Uji Asumsi Klasik 71
2. Uji Regresi Linear Berganda 76
3. Koefisien Determinasi (*R- square*) 77
4. Uji Hipotesis 78
C. Pembahasan 81

1. Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran. 82

2. Inflasi Terhadap Pengangguran 84

3. Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pengangguran 86

BAB V PENUTUP 89

A. Kesimpulan 89

B. Saran 90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pengangguran terbuka, Jumlah Penduduk, dan inflasi di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2006-2021 6

Tabel 4.1 Nama-Nama Kabupten/ Kota Di Sumatera Barat dan Luas Wilayahnya 64

Tabel 4.2 Hasil Uji Autokorelasi 66

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 67

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikoliniaritas 68

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 70

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi 71

Tabel 4.7 Hasil Uji Parsial (Uji t) 73

Tabel 4.8 Hasil Uji Simultan (Uji f) 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Philip 44

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 57

Gambar 4.1 Peta Administrasi Sumatera Barat.....62

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas 69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan mengarahkan pembagian pendapatan secara merata. Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital ataupun modal maupun sumber daya lainnya yang berupa teknologi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.[1]

Bagi negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan dilakukan untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan taraf hidup. Untuk itu, pemerintah selalu mengupayakan dengan melakukan pembangunan-pembangunan secara menyeluruh pada semua lapisan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota secara merata.

Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran serta menyediakan kesempatan kerja yang luas bagi penduduk untuk meningkatkan kemakmuran suatu masyarakat. Pembangunan ekonomi

[1]Michael P Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi 7. Jilid 1, (Jakarta :PT. Gelora Aksara Pratama, : Penerbit Erlangga, Jakarta, 2000), Hal. 7.

yang tidak merata akan menimbulkan berbagai permasalahan pada suatu negara. Permasalahan yang sering dijumpai di negara berkembang yakni masalah pengangguran.

Pengangguran adalah seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja dan secara aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran akan menimbulkan masalah baik dari sisi ekonomi maupun sosial. Seperti penurunan produktivitas, daya beli masyarakat menurunnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak, kriminalitas akan meningkat, menurunnya kualitas kesehatan dan yang paling fatal dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi maupun politik. Pengangguran juga menjadi beban ekonomi negara, pengangguran berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan nasional baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tingginya tingkat pengangguran akan mencerminkan baik buruknya perekonomian suatu negara/wilayahnya. Dalam artian tingkat pengangguran yang semakin tinggi menunjukkan kondisi perekonomian yang semakin buruk.

Pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil prosentasenya, hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja, atau didalam pasar tenaga kerja jumlah penawaran akan tenaga kerja yang ada lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah permintaan tenaga kerja.[2]

[2] Subandi.,*Ekonomi Pembangunan*,(Bandung: Alfabeta,2011), Hal. 98.

Indonesia merupakan negara berkembang, yangdalam pengelompokkan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakat, dimana salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi diakibatkan oleh pertambahan lowongan pekerjaan yang ada lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja yang ada. Sebagai efek dari hal tersebut, maka semakin banyak orang-orang tidak memperoleh pekerjaan. Jadi mereka akan menganggur secara riil dan sepenuh waktu, dan oleh karena itu dinamakan pengangguran terbuka.

Menurut pandangan Islam, menganggur bukanlah sesuatu yang dianjurkan dan masyarakat diharuskan bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, harus ada sinergi peran antara individu, masyarakat maupun negara. Menurut Islam negara harus menetapkan suatu kebijakan strategi politik dan mekanisme yang harus dilaksanakan sebagai jaminan agar pemenuhan tersebut berjalan dengan baik. Di antara mewajibkan warganya untuk bekerja sebagaimana diwajibkan oleh Allah SWT. Menyediakan berbagai fasilitas dan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dan dapat memperoleh pekerjaan. Sebab hal tersebut menjadi tanggungjawab negara. Untuk menjamin terlaksananya strategi pemenuhan kebutuhan pokok, Allah SWT berfirman: Q.S. Al-Jumu‟ah:10 :

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (الجمعة/62: 10)

Artinya:*"muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."*

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa pada mulanya pemenuhan kebutuhan pokok dan upaya meningkatkan kesejahteraan hidup manusia adalah tugas individu itu sendiri yakni dengan bekerja. Para ulama pun menyatakan bahwa wajib bagi negara memberikan sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan merupakan bagian tanggungjawabnya terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat sebagaimana telah diterapkan oleh Rasul dan para sahabat.

Tingginya tingkat pengangguran di Sumatera Barat diduga disebabkan beberapa faktor seperti jumlah penduduk yang tergolong besar, jumlah unit usaha yang sedikit, pertumbuhan ekonomi (penurunan PDRB menyebabkan kenaikan tingkat pengangguran), inflasi (kenaikan harga akan mengurangi output sehingga mengurangi tenaga kerja), upah (apabila upah turun maka orang lebih memilih untuk menganggur daripada bekerja), dan tenaga kerja (apabila pertambahan penduduk dengan angkatan kerja tinggi maka akan berdampak pada jumlah pengangguran yang tinggi).

Secara umum penduduk adalah setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dalam waktu yang cukup lama. Jumlah penduduk menunjukkan total manusia atau penduduk yang menempati suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Setiap tahun jumlah penduduk pasti terus bertambah dan akan berdampak pada tingkat pengangguran karena dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, maka jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja juga ikut meningkat. Angkatan

kerja membutuhkan lapangan pekerjaan dan umumnya di Negara berkembang laju pertumbuhan penduduk (termasuk angkatan kerja) lebih besar daripada laju pertumbuhan lapangan kerja. Oleh karena itu tidak semua angkatan kerja bisa mendapatkan pekerjaan dan akhirnya menganggur.

Selain jumlah penduduk, inflasi juga memiliki peran penting dalam perubahan jumlah tingkat pengangguran di Sumatera Barat. Inflasi merupakan kenaikan harga- harga secara umum. Inflasi yang terjadi karena adanya tarikan permintaan (*demand pull*) secara tidak langsung dapat mengurangi jumlah pengangguran. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan, apabila permintaan suatu barang meningkat, maka harga barang itu sendiri akan meningkat karena terbatasnya ketersediaan barang tersebut. Pada kondisi tersebut produsen berusaha memenuhi permintaan pasar dengan meningkatkan kapasitas produksinya. Peningkatan kapasitas produksi ini berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Sumatera Barat sebagai bagian dari perekonomian nasional tidak lepas dari permasalahan pengangguran terbuka. Jika dilihat dari tingkat pengangguran terbuka di Pulau Sumatera, Sumatera Barat dapat dikatakan memiliki pengangguran terbuka cukup tinggi dibandingkan dengan dengan beberapa provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera. Berikut ini data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat menunjukkan Pengangguran terbuka, Jumlah Penduduk, dan inflasi di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2006-2021 :

Tabel 1.1

Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk, Inflasi

Tahun	Pengangguran Terbuka (Jiwa)	Jumlah penduduk (Jiwa)	Inflasi
2006	243 525	2 051 800	50,795
2007	217 305	2 106 711	54,300
2008	171 134	2 127 512	61,185
2009	173 080	2 172 002	62,439
2010	152 586	2 194 040	67,335
2011	142 788	2 213 513	70,951
2012	142 184	2 179 826	73,902
2013	154 955	2 387 045	81,935
2014	158 236	2 502 702	91,424
2015	148 677	2 480 828	92,411
2016	149 687	2 577 041	96,930
2017	151 900	2 617 874	98,888
2018	141 680	2 552 130	101,459
2019	142 244	2 687 045	103,143
2020	190 609	2 772 133	105,315
2021	179 948	2 761 392	106,788

Sumber: BPS Sumatera Barat 2021

Pada Tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa pengangguran terbuka pada Provinsi Sumatera Barat mengalami fluktuasi selama 15 tahun terakhir yaitu dari tahun 2006-2021. Perubahan yang tertinggi terjadi pada tahun 2006 dengan jumlah pengangguran terbuka sebesar 243 525 Jiwa, dan tingkat pengangguran terbuka yang terendah di provinsi Sumatra Barat terjadi pada tahun 2018 sebesar 141 680 jiwa.

Begitu juga dengan data jumlah penduduk yang berdasarkan tabel diatas juga mengalami peningkatan fluktuasi dari tahun ke tahun yang mana jumlah penduduk terbanyak terdapat pada tahun 2020 sebesar 2.772.133 jiwa sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat pada tahun 2006 sebesar 2.051.800 jiwa.

Sedangkan data inflasi yang berdasarkan tabel diatas mengalami peningkatan terus menerus dari setiap tahunnya selama 15 tahun terakhir yaitu dari tahun 2006-2021.

Berdasarkan pada tabel di atas ada beberapa data yang tidak sesuai dengan teori yang ada, seperti pada tahun 2007 – 2008 yang mana pada tahun 2007-2008 pengangguran mengalami penurunan sebesar 46.171 jiwa yaitu pada tahun 2007 jumlah pengangguran sebesar 217.305 jiwa dan jumlah pengangguran pada tahun 2008 sebesar 171.134 jiwa sedangkan jumlah penduduk mengalami kenaikan sebesar 20.801 jiwa yaitu jumlah penduduk pada tahun 2007 sebesar 2.106.711 jiwa dan pada tahun 2008 sebesar 2.127.512 jiwa , hal ini disebabkan karena pada tahun 2007 -2008 kemungkinan banyak penduduk atau para pencari kerja yang membuka usaha usaha baru baik itu umkm maupun online shop sehingga mengakibatkan pengangguran pada tahun 2007-2008 mengalami penurunan.

Pada permasalahan pengangguran yang ada disetiap negara terutama di Indonesia pada provinsi Sumatera Barat, ada beberapa indikator makro yang mempengaruhi pengangguran seperti inflasi dan jumlah penduduk. Sehingga dalam hal ini pengangguran tidak saja dipengaruhi oleh satu masalah saja

namun ternyata pengangguran juga dipengaruhi oleh inflasi dan jumlah penduduk. Atas dasar tersebut penulis sangat tertarik untuk meneliti dengan judul **"PENGARUH JUMLAH PENDUDUK DAN INFLASI TERHADAP PENGANGGURAN TERBUKA DI PROVINSI SUMATERA BARAT".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan data adanya hubungan negatif antara jumlah penduduk dan pengangguran terbuka hal ini tidak sesuai dengan teori sukirno.
2. Berdasarkan data adanya hubungan postif antara inflasi dan pengangguran terbuka hal ini tidak sesuai dengan teori Philips.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang muncul pada penelitian ini yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat?
2. Seberapa besar pengaruh inflasi terhadap tingkat penganguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat?
3. Seberapa besar pengaruh secara simultan antara jumlah penduduk dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah diatas maka dapat dikemukakan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh secara simultan antara jumlah penduduk dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi akademis
   a. penelitian ini berguna sebagai salah satu syarat meraih gelar S1 Sarjana Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam (EI) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
   b. Menambah wawasan dan pengetahuan terkait bidang ilmu ekonomi islam khususnya pada kajian ekonomi makro mengenai pengangguran,inflasi dan jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Barat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman untuk referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti terkait dengan kajian makro ekonomi khusus nya pada topik pengangguran, jumlah penduduk, dan inflasi.
3. Bagi pemerintah daerah, diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan masukkan atau informasi mengenai masalah pengangguran, inflasi dan

pertumbuhan penduduk dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman memahami judul diatas, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang terdapat didalam judul yaitu:

Pengaruh : Kekuatan yang muncul dari suatu benda atau orang dan juga gejala dalam yang dapat memberikan perubahan yang dapat membentuk kepercayaan atau perubahan.[3]

Jumlah Penduduk : Seluruh penduduk yang ada di dalam suatu wilayah, yang menunjukkan persentase tingkat perubahan penduduk per tahunnya.

Inflasi : Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat.[4]

Pengangguran Terbuka : Bagian dari angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka

[3] Surakhmad, *Inofasi Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi aksara, 2012), Hal. 1.
[4] BPS Provinsi Sumatera Barat,2021. https://sumbar.bps.go.id

yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.[5]

[5] BPS Provinsi Sumatera Barat, 2021. https://sumbar.bps.go.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengangguran

1. Defenisi Pengangguran

Menurut BPS dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak berkerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja.[6]

Sedangkan menurut Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan tapi belum mendapatkannya.[7]

Menurut Zaini Ibrahim pengangguran merupakan kelompok orang yang ingin bekerja sedang berusaha bekerja (mendapatkan atau mengembangkan) pekerjaan tapi belum berhasil mendapatkannya.[8]

Arsyad mendefenisikan pengangguran sebagai orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak.[9]

---

[6] BPS Indonesia, 2021, https://bps.go.id

[7] Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, Hal. 328

[8] Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Banten: KOPSYAH BARAKA, 2013), Hal. 98

[9] Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan STIM YKPN, 2010), Hal. 81

Pengangguran (unemployment) adalah suatu kondisi dimana orang yang masuk dalam angkatan kerja sedang mencari pekerjaan, tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.[10]

Dengan demikian pengangguran dapat di defenisikan sebagai suatu keadaan dimana penduduk atau seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja, yang tidak memiliki pekerjaan, yang ingin bekerja, yang sedang mencari kerja dan mengembangkan usaha namun belum mendapatkan pekerjaan yang layak.

2. Jenis Jenis Pengangguran

1) Jenis Pengangguran berdasarkan penyebabnya

Sukirno membedakan pengangguran atas 3 jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya, antara lain:

a) Pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan kerjanya dan mencari kerja yang lebih baik atau sesuai dengan keinginannya.

b) Pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.

c) Pengangguran konjungtur, yaitu pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat.[11]

[10] Imamudin Yuliadi, Teori Ekonomi Makro Islam, (Depok: PT Raja Grafindo Persada,2019), Hal. 251

2) Jenis Pengangguran berdasarkan cirinya

Sadono Sukirno mengklasifikasikan pengangguran berdasarkan cirinya, dibagi ke dalam empat kelompok:[12]

a) Pengangguran terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri.

b) Pengangguran tersembunyi

Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar

---

[11] Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal 8-9.

[12] Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hal 10-11.

kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

c) Pengangguran bermusim

Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

d) Setengah menganggur

Pada negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (underemployed). Dan jenis penganggurannya dinamakan underemployment.

3. Teori Pengangguran

Ada beberapa teori menjelaskan tentang teori-teori pengangguran yaitu:

a) Teori Klasik

Teori klasik ini menjelaskan pandangan dalam bahwa pengangguran dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerap semua penawaran. Jadi dalam teori klasik tersebut jika terjadinya kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan

produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga kerja akan terus mengalami peningkatan karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibatnya keuntungan yang diperoleh menjadi rendah.

b) Teori Keynes

Dalam hal menanggapi masalah pengangguran Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan Teori Klasik. Menurut teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah, sehingga terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes hal ini tidak dapat dilimpahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akanturun dan hal ini akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang. Akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi pegangguran

1. Jumlah Penduduk

a. Defenisi penduduk

Menurut BPS penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Repuplik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan

atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.[13]

Menurut Imelda Pertumbuhan penduduk adalah bertambahnya jumlah penduduk secara kuantitas yang meningkat seiring dengan meningkatnya pemenuhan kebutuhan tersebut.[14]

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. [15]

Pertumbuhan penduduk adalah merupakan proses keseimbangan yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk.[16]

Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu yang dinamis antara komponen kependudukan yang dapat menambah dan mengurangi jumlah penduduk dibandingkan waktu sebelumnya.

Jumlah penduduk di suatu wilayah tidaklah tetap, namun akan selalu berubah (bertambah atau berkurang) seiring dengan perjalanan waktu. Pertambahan penduduk terjadi karena angka kelahiran dan angka kematian tidak seimbang, di mana angka kelahiran lebih besar

---

[13] BPS Indonesia, 2021. https://www.bps.go.id

[14]Imelda Hutasoit, *Pengantar Ilmu Kependudukan*,(Bandung: Alfabeta, 2017), Hal. 7

[15] Agustina Bidarti, *Teori Kependudukan*, (Bogor: Lindan Bestari, 2020), Hal. 2

[16] Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 16

dari angka kematian. Pertambahan penduduk juga dipengaruhi selisih angka penduduk yang masuk dan keluar suatu wilayah. Pertambahan penduduk suatu wilayah berupa angka-angka yang kongkret dalam pertambahan setiap tahunnya, sedangkan pertumbuhan penduduk berupa besaran persentasenya saja.

Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah pada masa yang akan datang. Dengan diketahuinya jumlah penduduk yang akan datang, diketahui pula kebutuhan dasar penduduk ini, tidak hanya di bidang sosial dan ekonomi, tetapi juga di bidang politik. Akan tetapi, prediksi jumlah penduduk dengan cara seperti ini belum dapat menunjukkan karakteristik penduduk di masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan proyeksi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang membutuhkan data yang lebih rinci. Kelahiran dan perpindahan penduduk di suatu wilayah menyebabkan bertambahnya jumlah penduduk di wilayah yang bersangkutan, sedangkan kematian menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk di wilayah tersebut.

Pertumbuhan penduduk memengaruhi secara langsung upaya peningkatan mutu pemanfaatan sumber daya manusia. Pertumbuhan penduduk merupakan sumber utama peningkatan jumlah sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan, pengembangan, serta pemanfaatan. Dalam hubungan ini, adanya pertumbuhan penduduk relatif masih tinggi memperberat tekanan terhadap sumber daya alam

dan lingkungan hidup serta mempersempit usaha-usaha menciptakan keserasian sosial.

b. Kriteria penduduk usia kerja

Penduduk usia kerja merupakan penduduk yang berusai 15 tahun keatas. Penduduk usia kerja ini dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja meliputi penduduk yang bekerja dan menganggur, sedangkan penduduk bukan angkatan kerja meliputi penduduk yang kegiatan utamanya sekolah, mengurus rumah tangga dan kegiatan lainnya.

c. Teori jumlah penduduk

1) Aliran Malthusian

Thomas Robert Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam "Essay on Population", Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangakan pertumbuhan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, pada kasus ini di mana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk di kota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang, hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan jika kita

kembali kepada teori Malthus.[17] Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertambahan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun, karena beban manusia yang makin banyak.

Menurut aliran ini pembatasan pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama dengan preventif checks (pengekangan diri), yang terdiri dari, (a) moral restraint (pengekangan diri); (b) mengekang nafsu seks; (c) tunda kawin; (d) vice atau kejahatan (pengurangan kelahiran): (e) pengguguran kandungan; (f) homoseksual. Cara kedua, positive checks (lewat proses kelahiran), yang terdiri dari, (a) Vice atau kejadian (pencabutan nyawa) terdiri dari bunuh anak-anak, bunuh orang cacat dan bunuh orang tua; (b) misery (kemelaratan) dengan cara epidemi, bencana alam. peperangan dan kekurangan makanan.

[17]Imelda Hutasoit, *Pengantar Ilmu Kependudukan*,(Bandung: Alfabeta, 2017), Hal 17

2) Aliran Marxist

Karl Marx dan Frederick Hegel sebagai pelopor aliran ini tidak sependapat dengan Malthus, (bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan. Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis).[18] Dasar pegangan Marxist adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beda pandangan Marxist dan Maltus adalah pada "Natural Resource" tidak bisa dikembangkan atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Berikut ini adalah beberapa pendapat aliran Marxis. a. Populasi manusia tidak menekan makanan, tapi memengaruhi kesempatan kerja. b. Kemelaratan bukan terjadi karena cepatnya pertumbuhan penduduk, tapi karena kaum kapitalis mengambil sebagian hak para buruh. c. Semakin tinggi tingkat populasi manusia, semakin tinggi produktivitasnya, jika teknologi tidak menggantikan tenaga manusia sehingga tidak perlu menekan jumlah kelahirannya, ini berarti ia menolak teori Malthus tentang moral restraint untuk menekan angka kelahiran.

[18]Imelda Hutasoit, *Pengantar Ilmu Kependudukan*, (Bandung: Alfabeta, 2017),Hal 19

3) Teori Kependudukan Kontemporer

Analisis ini dilengkapi oleh Meadow, melalui buku "The Limit to Growth" ia menarik hubunganantara variabel lingkungan (penduduk, produksi pertanian, produksi industri, sumber daya alam) dan polusi. Tapi walaupun begitu, melapetaka tidak dapat dihindari, hanya manusia cuma menunggunya, dan membatasi pertumbuhannya sambil mengelola alam dengan baik. Kritikan terhadap Meadow umumnya dilakukan oleh sosiolog yang menyindir Meadow karena tidak mencantumkan variabel sosial-budaya dalam penelitiannya.

Teori Kependudukan Kontemporer John Stuart Mill, seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan bahan makanan sebagai suatu aksioma. Namun demikian dia berpendapat bahwa pada situasi tertentu manusia dapat memengaruhi perilaku demografinya. Selanjutnya ia mengatakan apabila produktivitas seorang tinggi ia cenderung ingin memiliki keluarga kecil. Dalam situasi seperti ini fertilitas akan rendah.[19]

Jadi taraf hidup (standard of living) merupakan determinan fertilitas. Tidaklah benar bahwa kemiskinan tidak dapat dihindarkan (seperti dikatakn Malthus) atau kemiskinan itu

[19]Imelda Hutasoit, *Pengantar Ilmu Kependudukan*,(Bandung: Alfabeta, 2017), Hal 22

disebabkan karena sistem kapitalis (seperti pendapat Marx) dengan mengatakan, kalau suatu waktu di suatu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan ini hanyalah bersifat sementara saja. Pemecahannya ada dua kemungkinan yaitu mengimpor bahan makanan, atau memindahkan sebagian penduduk wilayah tersebut ke wilayah lain. Memperhatikan bahwa tinggi rendahnya tingkat kelahiran ditentukan oleh manusia itu sendiri, maka Mill menyarankan untuk meningkatkan tingkat golongan yang tidak mampu. Dengan meningkatnya pendidikan penduduk maka secara rasional maka mereka mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada. Di samping itu Mill berpendapat bahwa pentingnya distribusi kekayaan para konglomerat eropa.

2. Pertumbuhan Ekonomi

a. Defenisi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Barro and Lee pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksikan dalam masyarakat bertambah.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, yang terpusat pada tiga aspek, yaitu proses,

output per kapita dan jangka panjang, di mana menuju pada aspek dinamis dari suatu perekonomian.[20]

Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang di ukur menggunakan produk domestik bruto (PDB) maupun produk domestik regional bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.[21]

Menurut Ali Ibrahim Hasyim pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju kearah yang lebih baik selama periode tertentu.[22]

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian, dari suatu periode ke periode lainnya secara berkesinambungan dalam menuju kearah ekonomi yang lebih baik.

Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan. Perbedaan penting dengan pembangunan ekonomi bahwa pembangunan ekonomi tingkat pendapatan per kapita

---

[20] Eko Sudarmanto dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam:* (*Cetakan 1*, Yayasan Kita Menulis, 2021), Hal. 14

[21] Rahardjo adi sasmita, *Teori-teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan wilayah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 4

[22] Ali Ibrahim Hasyim, *Ekonomi Makro*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal.231

terus menerus meningkat, sedangkan pertumbuhan ekonomi belum tentu diikuti oleh kenaikan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atan tidak.

Tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu tahun tertentu (tahun t) dapat ditentukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{PE} = 1\frac{PDRBt - PDRB\ t - 1}{PDRBt - 1}x\ 100\%$$

Dimana:

PE = tingkat pertumbuhan ekonomi

PDRBt = PFRB pada tahun t

PDRBt-1 = PDRB pada tahun sebelumnya

Laju pertumbuhan ekonomi dikatakan meningkat dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat wilayah atau regional. Produk Domestik Bruto: (PDB) diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Sedangkan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu, nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun tertentu yang hanya mengukur pertumbuhan perekonomian dilingkup wilayah, pada umumnya wilayah provinsi atau kabupaten. Adapun cara penyajian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disusun dalam dua bentuk, yaitu:

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan atau yang dikenal dengan PDRB rill merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah. yang dihitung Terjadi tangan bebas atau pasar bebas dalam mencapai keseimbangan sehingga terjadi "full employment" atau kesempatan kerja penuh (tidak ada pengangguran).
2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku atau PDRB nominal merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah yang dihitung berdasarkan harga pada atau menilai produksi, biaya antara, ataupun nilai tambah.
3) Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga konstan (ADHK).

b. Teori Pertumbuhan Ekonomi

1) Teori Klasik (Adam Smith)

Teori klasik (Adam Smith) Adam Smith adalah tokoh klasik yang telah banyak membahas tentang teori teori ekonomi, termasuk salah satunya yaitu pertumbuhan ekonomi. Tertulis pada

bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes Weaklth of Nation (1776). Dalam pemikirannya, Smith mengkritik pandangan kaum nasiona merkantilis. Menurut Smith, kepemilikan atas emas dan perak oleh suatu negara bukanlah ukuran suatu kekayaan nasional, karena kekayaan nasional haruslah bersumber pada hasil kerja suatu Negara. Kekayaan nasional dapat dibentuk oleh dua hal yaitu Keterampilan dan penggunaan tenaga kerja secara efisien kemudian. Perimbangan yang tepat antara tenaga kerja produktif dan nonproduktif. Agar inti dari proses pertumbuhan ekonomi menurut Smith ini mudah dipahami, maka dibedakan menjadi dua aspek yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. [23]

Perhitungan output total dapat digunakan pada tiga variabel yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan persediaan capital atau modal. Sedangkan jika pada faktor kedua yaitu pertumbuhan penduduk, dilakukan dalam menentukan luas pasar dan laju pertumbuhan ekonomi. Teori ekonomi klasik mempunyai beberapa ciri-ciri yaitu sebagai berikut: (1) Perekonomian yang didasarkan pada sistem bebas berusaha (Laissez Faire) artinya mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi keseimbangan secara otomatis. Terjadi tangan bebas atau pasar bebas. Terjadi tangan bebas atau pasar bebas dalam mencapai keseimbangan

[23]Eko Sudarmanto dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam:* (*Cetakan 1*, Yayasan Kita Menulis, 2021), Hal. 16-17

sehingga terjadi "full employment" atau kesempatan kerja penuh (tidak ada pengangguran). (2) Pemerintah tidak ikut campur tangan. Peran pemerintah hanya pada masalah penegakan hukum, menjaga keamanan serta pembangunan infrastruktur. (3) Harga barang ditentukan oleh produsen dan konsumen.(4) Tingkat upah ditentukan oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Apabila kelebihan tenaga kerja maka akan menurunkan upah, tetapi apabila kekurangan tenaga kerja maka akan meningkatkan upah Menurut Adam Smith (1776), unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga salah satunya yaitu akumulasi modal.

Smith mengatakan cepat lambatnya pembangunan ekonomi tergantung pada kesediaan dana pembangunan tersebut. Selain itu stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tiga output. Peranannya sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal yang sesuai dengan batas maksimum sumberdaya alam. Dengan kata lain, pertumbuhan output akan melambat jika daya dukung sumberdaya alam tidak mampu mengimbangi laju kegiatan ekonomi. Ketersediaan stok modal ini ditentukan oleh jumlah tabungan masyarakat. Sementara jumlah tabungan masyarakat tergantung pada pola kepemilikan modal dari masyarakat tersebut. Selain itu menurut Smith pertumbuhan penduduk dinilai mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi. bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian. Karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi.[24]

2) Teori Pertumbuhan David Ricardo

Berbeda dengan Adam Smith, pendapat David Ricardo dalam pertumbuhan ekonomi yang mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam sebuah buku yang berjudul The Principles of Political Economy and Taxation. Menurut David Ricardo, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk, di di mana bertambahnya penduduk akan menambah tenaga kerja dan membutuhkan tanah atau alam. David Ricardo berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk yang terlalu besar hingga 2 kali lipat bisa menyebabkan melimpahnya tenaga kerja. Tenaga kerja yang melimpah menyebabkan upah yang diterima menurun, di mana upah tersebut hanya bisa untuk membiayai tingkat hidup minimum (subsistence level).

Teori keunggulan komparatif David Ricardo lahir dari adanya kelemahan yang ditemukan pada teori keunggulan absolutnya Adam Smith. Ricardo mengkritisi teori keunggulan absolut, di mana perdagangan internasional hanya mungkin dilakukan oleh

[24]Eko Sudarmanto dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam:* (*Cetakan 1*, Yayasan Kita Menulis, 2021), Hal 16

negara-negara yang mampu melakukan proses produksi untuk mencapai keuntungan absolut saja. Teori dari Adam Smith tersebut seolah hanya berlaku bagi negara-negara yang mampu melakukan spesialisasi produksi barang. Atas dasar kelemahan-kelemahan itulah, David Ricardo mengemukakan gagasan baru dalam lingkup perdagangan internasional berupa teori keunggulan komparatif. Menurut Ricardo, negara yang tidak memiliki keunggulan absolut bisa ikut terlibat dalam perdagangan internasional yang menguntungkan apabila mampu melakukan spesialisasi produksi barang yang memiliki biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Sebab, negara yang berhasil memproduksi barang dengan harga relatif lebih murah memiliki keunggulan komparatif.

Teori keunggulan komparatif ini bisa diterapkan dengan menggunakan asumsi sebagai berikut. (1) Perdagangan internasional hanya dilakukan di antara dua negara.(2) Objek barang atau komoditi yang diperdagangkan hanya ada dua jenis saja.(3) Setiap negara hanya memiliki dua unit faktor produksi saja.(4) Skala produksi bersifat content return to scale, yang artinya harga relatif barang-barang komoditas tersebut sama pada berbagai kondisi produksi. Berlaku teori nilai tenaga kerja (labor theory of value) yang menyatakan harga barang sama dengan atau dapat

dihitung dari jumlah jam kerja tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi barang tersebut. [25]

3. Inflasi

a. Defenisi Inflasi

R. Mc Connel Campbell dan Stanley L. Brue mengemukakan inflasi sebagai a rise in the general levelof prices, yang beararti inflasi merupakan kenaikan harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama periode waktu tertentu.

Menurut Sadono Sukirno Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga harga yang berlaku dalam suatu perekonomian.[26]

Taqyuddin Ahmad Ibn Al-Maqrizi, menyatakan bahwa inflasi terjadi ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan yang berlangsung secara terus-menerus. Pada saatitu persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, sedangkan konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk sejumlah barang dan jasa yang sama.[27]

Menurut Adiwarman Azwar Karim pengertian inflasi islam tidak berbeda dengan inflasi konvensional. Inflasi mempunyai pengertian sebagai sebuah gejala kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus menerus.Dari pengertian ini, inflasi merupakan gejala yang terjadi karena kenaikan harga barang yang terjadi secara sengaja ataupun secara alami yang terjadi tidak hanya di suatu tempat, tetapi di

---

[25]Eko Sudarmanto dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam:* (*Cetakan 1*, Yayasan Kita Menulis, 2021), Hal. 17

[26] Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar Ed.3*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 15

[27]VinnaSriYuniarti,*EkonomiIslam*,(Bandung: PustakaSetia,2016),h.53

seluruh penjuru suatu Negara, bahkan dunia.Kenaikan harga ini berlangsung secara berkesinambungan dan semakin meninggi jika tidak ditemukan solusi pemecahan penyimpangan penyimpangan yang menyebabkan inflasi tersebut.[28]

Dengan demikian, Inflasi dapat didefinisikan sebagai proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus yang berlaku dalam perekonomian. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu.

b. Teori Inflasi

1) Teori kuantitas

Teori ini merupakan pandangan dari teori klasik. Pada dasarnya teori klasik mengatakan : "perubahan-perubahan dalam penawaran uang akan menyebabkan kenaikan harga yang sama tingkatnya dengan tingkat penawaran uang." Menurut teori ini penyebab kenaikan harga barang atau jasa secara umum yang mengarah pada inflasi adalah: yang pertama Jumlah uang beredar, terlalu banyak uang yang dicetak dan diedarkan ke masyarakat akan berakibat inflasi. Peredaran ini tanpa diikuti penambahan produksi dan penawaran barang. Sirkulasi uang atau kecepatan perpindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lain begitu cepat sehingga masyarakat terlalu konsumtif. Jumlah uang beredar dimasyarakat ini baik uang kartal maupun uang giral. Semakin besar jumlah

[28]AdiwarmanA.Karim,*Ekonomi Makro Islami Edisi Kedua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012),h.133.

uang yang beredar dimasyarakat maka inflasi juga akan meningkat.[29]Yang kedua yaitu, Harapan psikologis masyarakat mengenai harga dimasa akan datang Apabila masyarakat memperkirakan harga barang di masa yang akan datang mengalami kenaikan terus-menerus maka beredarnya jumlah uang beredar tersebut akan direspon dengan membelanjakan uangnya saat ini juga dan menyimpan barang, terutama barang-barang yang bisa melindungi kekayaan dari inflasi, misalnya berlian, emas, properti. Akibatnya inflasi melambung tinggi. Tindakan tersebut dilakukan agar terhindar dari kerugian memegang uang tunai dan membelanjakannya dalam bentuk barang.[30]

2) Teori Keynesian

Menurut teori ini penyebab inflasi adalah beberapa kelompok masyarakat yang ingin hidup diluar batas kemampuannya. Kelompok masyarakat ini terbagi tiga kelompok, yaitu: pemerintah, pengusaha swasta, dan serikat buruh. Pertama Pemerintah, apabila pemerintah mengalami defisit anggaran pemerintah dengan dibiayai dari mencetak uang baru, yang kemudian beredar dimasyarakat maka pemerintah akan menyebabkan inflasi. Kedua, Pengusaha swasta, Pengusaha dapat menyebabkan inflasi apabila memaksakan diri investasi secara

[29] Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro Edisi Revisi*, (Serang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2013), hal. 130.

[30]Suparmono,*PengantarEkonomikaMakro,*(Yogyakarta:UnitPenerbitdanPercetakan(UPP)AMPYKPN), hal. 135.

besar-besaran dan investasi itu diperoleh dari kredit bank. Ketiga, Serikat buruh dapat menyebabkan inflasi apabila menuntut kenaikan gaji mereka diatas tingkat produktivitasnya.

Apabila ketiga kelompok tersebut bersinergi menjalankan prilakunya seperti diatas maka akan terjadi inflasi gap. Inflasi gap adalah permintaan efektif dari seluruh kelompok masyarakat pada harga berlaku melebihi jumlah barang yang mampu dihasilkan oleh perekonomian.

3) Teori sktrukturalis

Adalah teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian yang berkembang. Tidak jarang faktor- faktor struktural yang dikatakan sebagai sebab musabab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100% struktural. Sering dijumpai bahwa inflasi tersebut disebabkan oleh kebijaksanaan harga/moneter pemerintah itu sendiri.[31]

c. Jenis Jenis Inflasi

Masalah inflasi dalam perekonomian suatu negara di satu sisi dapat berdampak positif, tetapi di sisi lain sering berdampak negatif. Dalam jenis-jenis inflasi dibagi menjadi berbagai jenis yaitu sebagai berikut:

1) Berdasarkan Tingkat Keparahan

a) Inflasi ringan (kurang dari 10% pertahun)

[31]Julius R Latumaerissa. Perekonomian *Indonesia dan dinamika ekonomi global*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 174.

b) Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% pertahun)

c) Inflasi berat (antara 30% sampai 100% pertahun)

d) Hiper inflasi (lebih dari 100% pertahun)[32]

2) Berdasarkan Penyebabnya

a) Inflasi tarikan permintaan, inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini yang akan menimbulkan inflasi.

b) Inflasi desakan biaya, inflasi ini juga terjadi ketika perekonomian berkembang pesat pada saat tingkat pengangguran sangat rendah.

c) Inflasi diimpor, inflasi ini terjadi apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran di perusahaan-perusahaan. Contohnya kenaikan harga minyak.

4. Upah Minimum Provinsi

Gaji dalam pengertian sehari-hari diartikan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja tetap dan tenaga kerja professional seperti pegawai, pemerintah, dosen, guru, manajer, dan akuntan.Pembayaran itu

[32] P. Eko Prasetyo, *Fundamental Makro Ekonomi*, Beta Offset, Yogyakarta, 2013, hlm. 198

biasanya sebulan sekali.Upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada pekerja-pekerja yang kasar yang pekerjaanya selalu berpindah-pindah seperti, pekerja pertanian, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar.

Menurut Hasibuan upah adalah sejenis balas jasa yang dibayarkan kepada para pekerja harian dengan berpedoman atas perjanjian yang disepakati membayarnya.

Pemerintah di banyak Negara selalu berusaha melindungi kelompok yang lemah yaitu para buruh dalam hubungan kerja mereka dengan para pengusaha. Untuk melindungi para buruh pemerintah menentukan Undang-Undang suatu tingkat upah minimum yang boleh dibayar oleh pengusaha kepada pekerjanya. Tingkat upah minimum untuk suatu daerah disebut tingkat Upah Minimum Regional (UMR) dan ini berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Upah Minimum Regional (UMR) ditentukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan hidup layak (KLH), indeks harga konsumen, upah minimum yang berlaku secara regional kemampuan dan tingkat perkembangan perusahaan. Ketentuan UMR seharusnya tidak boleh terlalu jauh menyimpang dari tingkat upah rata-rata yang terjadi dipasar tenaga kerja sebab jika UMR telalu tinggi maka pengusaha akan sangat behatihati dalam memilih tenaga kerja yang digunakan, tenaga kerja akan dipilih yang memang benar-benar produktif dan efisien. Sehingga sebagai akibatnya UMR yang sangat tinggi tersebut

akan menimbulkan pengangguran dan UMR hanya melindungi mereka yang sudah bekerja.[33]

Menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Pengupahan menyebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya.[34]

Tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat penduduk berpendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Tujuan penetapan upah minimum dapat dibedakan secara mikro dan makro.

Secara mikro tujuan penetapan upah minimum adalah sebagai jaring pengaman agar upah tidak merosot, mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan dan meningkatkan penghasilan pekerja pada tingkat paling bawah. Sedangkan secara makro, penetapan upah minimum bertujuan untuk pemerataan pendapatan, peningkatan daya beli pekerja dan perluasan kesempatan kerja, perubahan struktur biaya

---

[33] Suparmoko, *Pengantar Ekonomika Makro,* (Yogyakarta- BPFE, 2009), hlm. 184-185

[34] Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, Melania Kiswandari, *Asas-Asas Hukum Perburuhan,* (Jakarta RajaGrafindo Persada,2014), hlm. 99-100.

industri sektoral, peningkatan produktivitas kerja nasional, peningkatan etos dan disiplin kerja, dan memperlancar komunikasi pekerja dan pengusaha dalam rangka hubungan bipartite. Pada awalnya upah minimum ditentukan secara terpusat oleh Departemen Tenaga Kerja untuk regional atau wilayah wilayah di seluruh Indonesia.

Dalam perkembangan otonomi daerah kemudian mulai tahun 2001 upah minimum ditetapkan oleh masing masing provinsi. Selain itu,kebijakan pemerintah tentang penetapan upah minimum secara Makro Nasional adalah bertujuan untuk meningkatkan:

a. Pemerataan pendapatan, karena kenaikan upah minimum akan mempersempit kesenjangan upah pekerja terendah dan upah pekerja tertinggi.
b. Daya beli pekerja, karena kenaikan upah minimum akan secara langsung meningkatkan daya beli pekerja, dan selanjutnya akan mendorong lajunya ekonomi rakyat.
c. Perubahan struktur biaya, kaerna kenaikan upah minimum secara otomatis akan memperbaiki struktur upah terhadap biaya produksi.
d. Produktivitas nasional, karena kenaikan upah minimum akan memberikan insentif bagi pekerja untuk bekerja lebih giat untuk meningkatkan produktivitas di perusahaan, dan berkelanjutan secara nasional.

e. Etos dan disiplin kerja, karena dengan terpenuhinya kebutuhan minimumnya pekerja akan berkonsentrasi dan tenang dalam bekerja sehingga akan meningkatkan semangat dan disiplin pekerja.[35]

Berdasarkan peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 01/MEN/1999 bab I pasal 1 tentang Upah Minimum, upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum yang berlaku sektoral di daerah Kabupaten/Kotamadya menurut wilayah pembangunan daerah disebut dengan upah minimum sektoral regional tingkat II. Upah minimum ditetapkan berdasarkan standar layak hidup dengan memperhatikan produktivitas pertumbuhan ekonomi.[36]

a. Teori Upah

1) Teori Arthur Lewis

Asumsi teori Lewis yaitu perekonomian suatu negara terbagi menjadi dua sektor: (1) sektor tradisional yaitu sektor pertanian subsisten yang surplus tenaga kerja, dan tingkat upah yang rendah,dan (2) sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dengan upah yang lebih tinggi pula, dan menjadi penampung transfer tenaga kerja dari sektor tradisional. Perbedaan tingkat upah tenaga kerja pada kedua sektor ini akan menarik banyak tenaga kerja untuk berpindah (migrasi) dari sektor pertanian ke sektor industri. Produktivitas marjinal tenaga kerja di

[35] Aloysius Uwiyono, Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, Melania Kiswandari, Asas-*Asas Hukum Perburuhan*, (Jakarta RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 102

[36] Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*,(, Bandung Pustaka Setia, 2013) hlm. 172-173

sektor industri lebih tinggi dari upah yang mereka terima, sehingga mengakibatkan terbentuknya surplus sektor industri. Surplus sektor industri dari selisih upah ini diinvestasikan kembali seluruhnya dan tingkat upah di sektor industri diasumsikan konstan serta jumlahnya ditetapkan melebihi tingkat rata-rata upah di sektor pertanian. Proses transfer tenaga kerja tersebut selanjutnya ditentukan oleh tingkat investasi dan akumulasi modal secara keseluruhan di sektor industri.[37]

2) Teori Manning

Teori ini mencatat terdapat banyak praktik-praktik di pasar tenaga kerja di berbagai segmen industri manufaktur Indonesia. Segmentasi ini dapat terjadi dalam perekonomian yang mengalami perubahan yang cepat akibat masuknya investasi asing. Adanya segmentasi pasar tenaga kerja menimbulkan implikasi penting bagi kebijakan ekonomi yang menangani masalah upah dan dan alokasi tenaga kerja antara berbagai segmen ekonomi, antara daerah perdesaan dan perkotaan. Manning mengidentifikasi setidaknya terdapat empat karakter utama segmentasi pasar tenaga kerja, yaitu : a) terdapat perbedaan upah yang besar dan terus-menerus antara berbagai segmen pasar; b) terkonsentrasinya pekerja dengan karateristik yang berbeda (terutama menurut pengalaman, pendidikan, dan jenis kelamin) di segmen yang berbeda; c)

[37] Jhingan, M, L. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) Hal 156 -158

kurangnya mobilitas pekerja antar segmen, d) produktivitas tenaga kerja lebih tinggi di segmen pasar dengan upah tinggi.[38]

C. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Pengangguran

Secara umum penduduk adalah setiap orang yang berdomisili atau bertempat tinggal di dalam wilayah suatu negara dalam waktu yang cukup lama. Jumlah penduduk menunjukkan total manusia atau penduduk yang menempati suatu wilayah pada jangka waktu tertentu. Setiap tahun jumlah penduduk pasti terus bertambah dan akan berdampak pada tingkat pengangguran karena dengan meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk, maka jumlah tenaga kerja dan angkatan kerja juga ikut meningkat.

Menurut sukirno pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Menurut Sadono Sukirno pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong.[39]

Pertumbuhan penduduk yang tinggi menyebabkan cepatnya laju pertumbuhan angkatan kerja terutama dikalangan tenaga kerja

---

[38] Mudrajad Kuncoro, *Ekonomika Pembangunan. Masalah, Kebijakan, dan Politik.* (Jakarta: Erlangga, 2010) Hal. 126

[39] Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hal 8.

muda.[40]Semakin besar jumlah penduduk usia kerja, maka secara otomatis jumlah angkatankerja akan bertambah. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatankerja semakin baik. Bila peningkatan angkatankerja seiring dengan bertambahnya partisipasi penduduk yang bekerja, hal ini dapat berarti peningkatan tingkat pertisipasi angkatankerja diiringi dengan menurunnya partisipasi penduduk yang bekerja, ini pertanda bahwa pemicu tingginya tingkat partisipasi angkatan kerja adalah meningkatnya penduduk yang mencari pekerjaan. Dengan kata lain akan mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran yang disebabkan karena terbatasnya lapangan pekerjaan dalam menampung angkatankerja.[41]

D. Hubungan Inflasi dengan Pengangguran

Berbagai studi dan teori telah dilakukan untuk mengkaji hubungan antara inflasi dan pengangguran. Studi yang umum dibahas dalam kajian hubungan ini adalah teori yang dikenal dengan teori Philips. Teori yang mengkaji hubungan antara pengangguran dan inflasi pertama kali dilakukan oleh A.W. Philips dari London Scholl of Economics pada tahun 1958, dengan dasar teorinya yang sering dikenal sebagai kurva Philips.

Menurut teori A.W. phillips inflasi memberikan pengaruh negatif terhadap jumlah pengangguran. Hal ini terjadi karena didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan naik, harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi

[40] Basir Barthos, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makro*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm.64

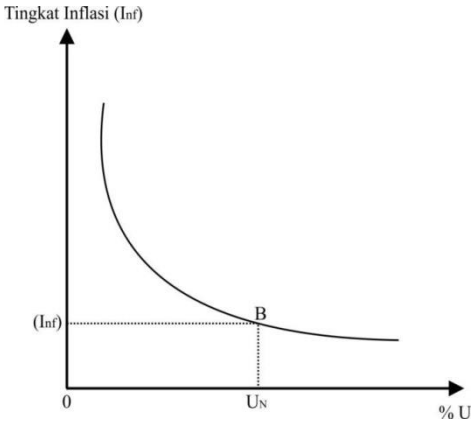
[41] Mulyadi, *Op.cit*, hlm.74

permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambahkan tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran berkurang.

Latar belakang timbulnya teori ini karena adanya keraguan terhadap masalah pokok dan implikasi kebijakan makro ekonomi pada tahun 1950- an, yang ingin mencapai secara serentak kestabilan harga serta kesempatan kerja yang tinggi (penuh). Dasar teori pertama diketemukan adanya hubungan negatif antara persentase tingkat upah dengan tingkat pengangguran, yang kemudian kurva ini lebih dikenal sebagai kurva Philips, sesuai dengan nama penemunya, dan selanjutnya kurva Philips ini dikenal sebagai kurva Philips pertama.[42]

Gambar 2.1

Kurva Philip



Kurva Philip

[42]P.Eko Prasetyo, *Fundamental Makro Ekonomi*, (Yogyakarta: Beta Offset ,2013),hlm.231

Dasar teori ini adalah (pembaruan), yakni berdasarkan pendekatan harga harapan (*rational expectation*), yang kemudian variabel upah diganti dengan variabel tingkat harga dan kemudian tingkat harga diganti dengan tingkat inflasi. Pada akhirnya teori kedua ini menemukan adanya hubungan negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat persentase pengangguran, yang selanjutnya kurva Philips ini sering dikenal dengan kurva Philips kedua. Ketika terjadi depresi di Amerika Serikat tahun 1929,terjadi inflasi yang lebih tinggi dan diikuti dengan tingkat upah yang tinggi pula. Berdasarkan data tersebutlah A.W.Philips mengamati hubungan antara inflasi dan pengangguran, dalam arti jika inflasi tinggi maka pengangguran rendah. Hasil pengamatan ini dikenal sebagai kurva Philips hingga sekarang.[43]

E. Pengangguran, jumlah penduduk dan inflasi dalam pandangan Islam

1. Pengangguran dalam perspektif islam

Menganggur dalam Islam bukanlah suatu yang dianjurkan, tetapi bekerja dalam Islam adalah suatu tuntutan yang harus dilakukan. Menurut Imam Syaibani: "kerja merupakan usaha untuk mendapat harga dengancara halal. Dalam Islam kerja sebagai unsur produksi didasari konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggungjawab untuk menginvestasikan dan mengembangkan harta yang diamanatkan Allah untuk menutupi kebutuhan manusia".

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang

[43]P.EkoPrasetyo,*Fundamental Makro Ekonomi*, (Yogyakarta BetaOffset ,2013), hlm. 232

mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerja sesuai dengan firman Allah QS. An-Nahl 97:

مَنْعَمِلَصَالِحًامِّنْذَكَرٍاَوْاُنْثٰىوَهُوَمُؤْمِنٌفَلَنُحْيِيَنَّهٗحَيٰوةًطَيِّبَةًۚوَلَنَجْزِيَنَّهُمْاَجْرَهُمْبِاَحْسَنِمَاكَانُوْايَعْمَلُوْنَ

(النحل/16: 97)

Artinya:*"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."*[44]

Menurut salah satu ulama, Dr. Yusuf Qardhawi mengungkapkan pengangguran dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Pengangguran jabariyyah (terpaksa), yaitu suatu pengangguran yang seseorang tidak mempunyai hak sedikitpun memilih status ini dan terpaksa menerimanya. Pengangguran seperti ini umunya terjadi, karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun.
b. Pengangguran khiyariyyah, yaitu seseorang yang memilih untuk menganggur, padahal dia pada dasarnya adalah orang yang mampu untuk bekerja, namun pada kenyataanya dia memilih untuk berpangku tangan dan bermalas-malasan, sehingga menjadi beban bagi orang lain. Dia memilih hancur dengan potensi yang dimiliki dibandingkan menggunakannya untuk bekerja.

Masalah pengangguran berhubungan dengan sumber daya manusia yang tidak termanfaatkan yang disebabkan karena lapangan kerja yang terbatas atau kualitas sumber daya manusianya yang kurang. Dalam rangka

[44] QS. An-Nahl (16) : 97

mencapai sumber daya manusia yang berkualitas maka dibutuhkan berbagai upaya, diantaranya dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia. Schultz mengemukakan beberapa upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, di antaranya terdapatnya pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah dan pendidikan pada tingkat tinggi. Manfaat dari pendidikan itu antara lain:

a. Dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif, karena adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian.
b. Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas.
c. Terciptanya suatu kelompok pemimpin yang terdidik guna mengisi jabatan-jabatan penting dalam dunia usaha maupun pemerintahan.
d. Tersedianya berbagai macam program pendidikan dan pelatihan yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan dalam keahlian dan mengurangi angka buta huruf.[45]

Selain kualitas sumber daya manusia yang harus ditingkatkan, kebijakan pemerintah juga sangat diperlukan untuk mengatasi pengangguran. Dengan katalain, dibutuhkan upaya pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang usaha untuk mengatasi pengangguran diperlukan karena jumlah penduduk yang selalu bertambah akan menyebabkan pertambahan tenagakerja yang terus bertambah. Maka untuk

[45] Nurul Huda, dkk *Ekonomi Pembangunan Islam*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.164

menghindari masalah pengangguran yang semakin serius, tambahan lowongan pekerjaan yang cukup perlu disediakan. Dalam jangka pendek pengangguran dapat menjadi bertambah serius yaitu ketika berlaku kemunduran atau pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dalam masa seperti itu kesempatankerja bertambah dengan lambat dan pengangguran meningkat. Dan usaha pemerintah untuk mengatasi pengangguran perlu ditingkatkan.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh imam Bukhari disebutkan, "bahwa ada seseorang yang mencari Rasulullah, dengan harapan Rasulullah akan memperhatikan masalah yang dihadapinya. Ia adalah seorang yang tidak mempunyai sarana yang dapat digunakan untuk bekerja dalam rangka untuk mendapatkan suatu hasil (kekayaan), juga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Kemudian Rasulullah SAW memanggil beliau. Lalu beliau serahkan pada orang tersebut. Beliau perintahkan kepadanya agar ia pergi ke suatu tempat yang telah beliau tentukan dan bekerja disana, dan nanti kembali lagi memberi kabar tentang keadaannya. Setelah beberapa waktu, orang itu mendatangi Rasulullah SAW seraya mengucapkan rasa terima kasih kepada beliau atas bantuannya. Ia menceritakan tentang kemudahan yang kini didapati".

Para ulama pun menyatakan bahwa wajib bagi negara memberikan sarana-sarana pekerjaan kepada para pencari kerja. Menciptakan lapangan kerja adalah kewajiban negara dan merupakan bagian tanggung jawabnya

terhadap pemeliharaan dan pengaturan urusan rakyat sebagaimana telah diterapkan oleh rasul dan sahabat.[46]

2. Jumlah Penduduk dalam perspektif Islam

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan, yang tentunya keturunan yang banyak tersebut betul-betul diharapkan kebermanfaatannya, bukan justru mengacaukan dan memperburuk wajah Islam dan umat Islam. Seperti banyak umat Islam yang berada pada kebodohan, kemiskinan dan kemelaratan. Diantara penyebabnya adalah jumlah populasi manusia yang semakin banyak tanpa diiringi dengan kualitas. Sehingga negara tidak mampu memberikan fasilitas kehidupan yang layak bagi pendidikan, pekerjaan dan kesehatan masyarakatnya. Islam pada hakikatnya menghendaki umatnya memiliki keturunan-keturunan yang baik secara fisik maupun psikis. Pendidikan, kesehatan dan ekonomi anak-anak terjamin sampai hari tuanya. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an : (Q.S.An-Nisa: 9) :

وَلْيَخْشَالَّذِيْنَلَوْتَرَكُوْامِنْخَلْفِهِمْذُرِّيَّةًضِعٰفًاخَافُوْاعَلَيْهِمْۖفَلْيَتَّقُوااللّٰهَوَلْيَقُوْلُوْاقَوْلًاسَدِيْدًا (النسآء/4: 9)

Artinya: *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar".*

3. Inflasi dalam perspektif Islam

Ekonomi Islam merupakan ikhtiar pencarian sistem ekonomi yang lebih baik setelah ekonomi kapitalis gagal total. Bisa dibayangkan betapa

[46] Nurul Huda, dkk *Ekonomi Pembangunan Islam*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),hlm. 187-194

tidak adilnya, betapa pincangnya akibat sistem kapitalis yang berlaku sekarang ini, yang kaya semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Selain itu,dalam pelaksanaannya,ekonomi kapitalis ini banyak menimbulkan permasalahan. Pertama, ketidakadilan dalam berbagai macam kegiatan yang tercermin dalam ketidakmerataan pembagian pendapatan masyarakat. Kedua, ketidakstabilan dari sistem ekonomi yang ada saat ini menimbulkan berbagai gejolak dalam kegiatannya.[47]

Menurut para ekonom Islam, inflasi berakibat buruk bagi perekonomian karena:

a. Menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan (nilai simpan), fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Orang harus melepaskan diri dari uang dan aset keuangan akibat dari beban inflasi tersebut. Inflasi juga telah mengakibatkan terjadinya inflasi kembali, atau dengan kata lain “self feeding inflation”.
b. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat.
c. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah.
d. Mengarahkan investasi pada hal-hal yang non-produktif yaitu penumpukkan kekayaan (hoarding) seperti: tanah, bangunan, logam mulia, mata uang asing, dengan mengorbankan investasi ke arah

[47] Nurul Huda, dkk *Ekonomi Pembangunan Islam*,(Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),hlm.189

produktif seperti: pertanian, industrial, perdagangan, transportasi dan lainnya.[48]

Ekonom Islam Taqiudin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364M – 1441M), yang merupakan salah satu murid dari Ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu natural inflation dan human eror inflation.

a. Natural Inflation

Sesuai dengan namanya, jenis ini diakbatkan oleh sebab-sebab alamiah, dimana orang tidak mempunyai kendali atasnya. Misal, karena terjadi kekeringan sehingga kekurangan persediaan barang. Menurut Maqrizi, proses untuk dapat terjadinya natural inflation ini sama dengan penyebab inflasi dari sisi permintaan dan penawaran agregatif. Selain itu, secara sederhana ia juga menggunakan alat bantu model Irving Fisher (Fisher Model) tentang teori permintaan uang yakni; MV = PT untuk menjelaskan proses terjadinya jenis natural inflation ini. Dengan model MV = PT tersebut, natural inflasi dapat diartikan sebagai:

1) Gangguan terhadap jumlah barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian (T). Misalnya jumlah barang dan jasa (T) naik sedangkan jumlah uang yang beredar (M) dan kecepatan peredaran uang (V) tetap, maka konsekuensinya tingkat harga (P) naik.

[48] Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 189.

2) Naiknya daya beli masyarakat secara riil. Misalnya nilai ekspor lebih besar daripada nilai impor, sehingga secara netto terjadi impor uang yang mengakibatkan jumlah nuang yang beredar (M) turun sehingga keepatan uang yang beredar (V) dan jumlah barang dan jasa (T) tetap maka tingkat harga (P) naik.

b. Human Error Inflation

Selain dari penyebab-penyebab yang dimaksud pada *natural inflation*, maka inflasi-inflasi yang disebabkan oleh hal-hal lainnya dapat digolongkan sebagai *human error inflation* atau *False Inflation*. *Human error inflation* dikatakan sebagai inflasi yang diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri. Seperti yang terkandung dalam firman Allah QS. Ar-Ruum(30) :41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ (الرّوم/30: 41)

Artinya: *"Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)"*

Human error inflation dapat dikelompokkan menurut penyebab-penyebabnya sebagai berikut:

1) Korupsi dan administrasi yang buruk.
2) Pajak yang berlebihan.
3) Percetakan uang dengan maksud menari keuntungan yang berlebihan.

F. Kajian Terdahulu

N No	Penelitian Tahun	Sumber	Judul	Hasil Penelitian
1	Veren A Shafira, Anderson G Kumenaung, Audie O Niode (2020).	Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol.9.No. 1.	Analisis Pengaruh Ump, Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Tingkat Penganggur an terbuka Di Kota Manado.	Hasil penelitian menunjukan bahwa UMP berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran terbuka. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka dan inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terbuka.
2	Diena Fadhilah Nurlinda (2018).	Liabilities Jurnal Pendidikan Akuntansi e-ISSN 2620-5866 Volume 1. No.2.	Pengaruh Inflasi, Kesempatan Kerja Terhadap Penganggur an Terbuka Dan PAD Dengan Pertumbuhan Ekonomi SebagaiPemoderasi Di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara.	Hasil penelitian dan pengujian data secara statistik dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : (a). Inflasi dan kesempatan kerja berpengaruh signifikan secara simultan terhadap pengangguran terbuka di provinsi Sumatera Utara tetapi tidak secara parsial. (b). Inflasi dan kesempatan kerja signifikan secara simultan terhadap pengangguran terbuka di provinsi Sumatera Utara tetapi tidak secara parsial, hanya kesempatan kerja yang berpengaruh signifikan terhadap PAD. (c). Inflasi dan kesempatan kerja tidak berpengaruh terhadap pengangguran terbuka di Kabupaten/kota provinsi Sumatera Utara dan akan semakin lemah ketika

				pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi semakin rendah. (d). Inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Utara dan semakin lemah ketika pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi semakin rendah sementara kesempatan kerja berpengaruh terhadap PAD dan semakin kuat ketika pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi semakin tinggi.
3	Ahmad Suhendri (2021).	Nusantara Hasana Journal, Vol.1.No. 6.	Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terhadap penganggur an terbuka di kota Mataram.	Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan software SPSS Maka dapat diperoleh hasil regresi secara parsial dan simultan yaitu variabel bebas Pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat Pengangguran di Mataram, sedangkan hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,677, Artinya variabilitas variabel bebas sebesar 67,7%. Sedangkan 32,3% dipengaruhi oleh Variabel lain yang tidak diteliti.
4	M Arizal, Marwan Marwan (2019).	Jurnal Ecogen, Vol.2.No. 3.	Pengaruh Produk Domestik Regional	Hasil estimasi menunjukkan Bahwa, produk domestik regional bruto berpengaruh

			Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Tingkat Penganggur an Terbuka di Provinsi Sumatera Barat.	negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Barat Sumatera, dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Barat Sumatera. Sementara itu secara simultan Bruto Regional Bruto dan Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat.
5	Anzas Fernando Sirait, YulmardiYulma rdi, Adi Bhakti (2019).	E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangu nan Daerah, Vol.7.No. 3.	Faktor-faktor yang mempengar uhi penganggur an terbuka di Provinsi Jambi.	Hasil penelitian menemukan: 1) Rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jambi selama Tahun 2000-2016 adalah sebesar 5, 44 persen pertahun. Di sisi lain, pada periode yang sama, investasi PMDN tumbuh rata-rata 1, 16 persen pertahun, upah tumbuh rata-rata sebesar 1, 54 persen pertahun, pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6, 45 persen pertahun, inflasi rata-rata sebesar 8, 96 persen pertahun, dan investasi tumbuh rata-rata 11, 64 persen pertahun; 2) Secara simultan, upah, pertumbuhan ekonomi, inflasi dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terbuka. Secara parsial upah berpengaruh positif

				dan signifikan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan, inflasi tidak berpengaruh signifikan dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka.
6	Putri Sari MJ Silaban, Intan Permata Sari Br Sembiring, Vini Alvionita Br Sitepu (2020).	Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, Vol.11. No.2.	Analisis Pengaruh PDRB dan Inflasi terhadap Penganggur an Terbuka di Sumatera Utara Periode 2003-2019.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Produk Domestik Rill Bruto (PDRB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terbuka di Sumatera Utara pada tahun 2003-2019. Secara parsial inflasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Sumatera Utara pada tahun 2003-2019. Secara simultan variabel PDRB dan inflasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Utara pada tahun 2003-2019.

G. Kerangka Pemikiran

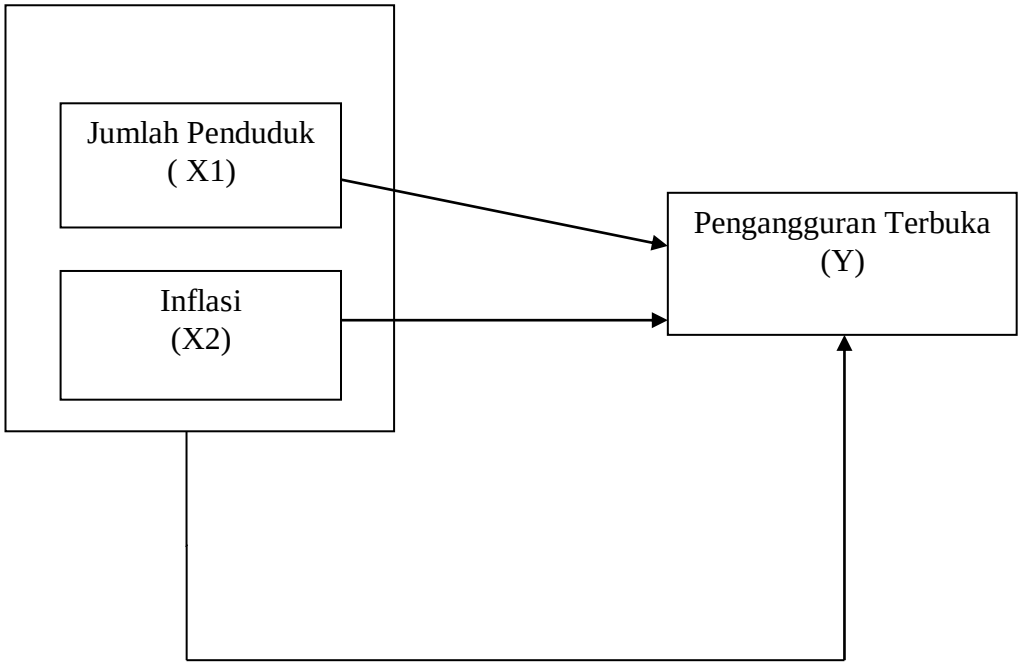
Berdasarkan teori di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk dan inflasi akan memperngaruhi besarnya pengangguran. Dimana Jumlah penduduk berhubungan dengan peningkatan partisipasi angkatan kerja. Jika peningkatan partisipasi angkatan kerja tidak diiringi dengan penambahan lapangan pekerjaan, maka akan berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Begitu juga dengan inflasi yang mempunyai pengaruh terhadap besarnya

tingkat pengangguran. Sedangkan dalam Islam menganggur bukanlah suatu anjuran dan bekerja adalah suatu tuntutan yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena dalam Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi, bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu.

Oleh karena itu, untuk memudahkan penelitian yang dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini digambarkan suatu kerangka pemikiran secara skematis sebagai berikut:

Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran



H. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat

pertanyaan.[49]Berdasarkan dari teori dan hasil penelitian sebelumnya di atas, maka dalam penelitian ini hipotesisnya adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengaruh signifikan antara jumlah penduduk (X1) terhadap pengangguran terbuka (Y) di provinsi Sumatera Barat.
   a. H0: $\beta 1 = 0$
   b. Hα: $\beta 1 \neq 0$
2. Adanya pengaruh signifikan antara Inflasi (X2) terhadap pengangguran terbuka (Y) di provinsi Sumatera Barat.
   a. H0: $\beta 2 = 0$
   b. Hα: $\beta 2 = 0$
3. Adanya pengaruh signifikan secara simultan antara jumlah penduduk (X1) dan inflasi (X2) terhadap pengangguran terbuka (Y) di provinsi Sumatera Barat.
   a. H0: $\beta 1 = \beta 2 = 0$
   b. Hα: $\beta 1 \neq \beta 2 \neq 0$

[49] Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&G*, (Bandung Alfabeta,2013), hlm. 96.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dimana metode kuantitatif merupakan suatu pengukuran data-data kuantitatif yang dihitung melalui perhitungan ilmiah, data berupa angka yang digunakan untuk menganalisis keterangan apasaja yang ingin diketahui. Variabel terikat dari penelitian ini adalah tingkat pengangguran. Dengan pendekatan kuantitatif deskriptif pengaruh jumlah penduduk (X_1) dan inflasi (X_2) terhadap Tingkat Pengangguran terbuka(Y).[50]

B. LokasiPenelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Provinsi Sumatera Barat yaitu di Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Juni sampai Juli 2022.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.[51]Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dari BPS Provinsi Sumatera Barat dan website Sumatera Barat Tahun 1992-2021

---

[50] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Rdan D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 15

[51]Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal.30.

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel terikat (*dependent variabel*) dan variabel bebas (*independent variabel*).

1. Variabel Terikat (*dependent variabel*)

   Variabel terikat adalah variabel penelitian yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.[52]Dalam penelitian ini variabel terikat yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka yang terjadi di provinsi Sumatera Barat dari tahun 1991-2021 dalam satuan persen (%).

2. Variabel Bebas(IndependentVariabel)

   Variabel bebas adalah suatu variabel yang variasinya mempengaruhi variabel lain. Dapat pula dikatakan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas antara lain:

   a. JumlahPenduduk(X1)

      Jumlah penduduk merupakan Seluruh penduduk yang ada di dalam suatu wilayah, yang menunjukkan persentase tingkat perubahan

[52]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Rdan D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.38-39

penduduk per tahunnya. Jumlah penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk di provinsi Sumatera Barat pertahunnya.

b. Inflasi(X2)

Tingkat inflasi menunjukkan besarnya perubahan harga-harga secara umum pada periode waktu tertentu. Tingkat inflasi yang digunakandalam penelitian ini adalah rata-rata tingkat inflasi yang terjadi diprovinsi Sumatera Barat berdasarkan tahun kalender pada periode satu tahun tertentu (*year on year*) dengan satuan(%) persen.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menghimpun data dilokasi penelitian, penulis menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antarannya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant* observation (observasi berperan serta) dan *non participant* observasi.[53] Pada teknik ini, penulis akan menggunakan observasi nonpartisipan, yaitu

[53] Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, (Bandung Refika Aditama, 2012), hal. 211

mengadakan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengetahui keadaan dan masalah yang akan diteliti tanpa ikut terlibat dalam kegiatan di dalammnya.

2. Dokumentasi

Mengumpulkan data melalui data yang tersedia yaitu biasanya berbentuk surat, catatan harian, laporan, artefak, foto dan dapat juga berbentuk file di server, dan flashdisk serta data yang tersimpan di website. Data ini bersifat tidak terbatas pada ruang dan waktu.[54] Data- data ini diperoleh dari data resmi yang diterbitkan oleh badan pusat statistik.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut. Deskriptif kuantutatif dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu menganalisis pengaruh antar variabel.

Alat uji analisis data menggunakan analisis regresi berganda, yaitu tentang analisis bentuk dan tingkat hubungan antara satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen.[55]Untuk kebsahan data maka digunakan uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji koefesien determinan (R2) dan uji hipotesis.

---

[54] Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141

[55]Lukas Setia Atmaja, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*,(Yogyakarta: ANDI, 2019), hlm.177

1. Uji Asumsi klasik

   a. Uji Autokorelasi

      Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

   b. Uji Normalitas

      Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang berdistribusi normal. Normalitas data dapat dilihat menggunakan uji Normal Kolmogorov-Smirnov. Dengan pengambilan keputusan:

      1) Jika Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal.
      2) Jika Sig < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal[56]

   c. Uji Multikolinieritas

      Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel

[56] V. Wiratna Sujarweni, *SPSS untuk Penelitian*,(Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), hlm52-56

independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.[57]

d. Uji Hekteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residul suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar Scatterplot. Regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika:

1) Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0.
2) Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.
3) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
4) Penyebaran titik-titik tidak berpola.[58] Jika hasil output Scatterplot demikian, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

2. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent. Formulasi regresi linear berganda adalah sebagai berikut:[59]

$$Y= a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

[57]Lukas Setia Atmaja, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*,(Yogyakarta: ANDI, 2019),Hal. 185

[58]Lukas Setia Atmaja, *Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi*,(Yogyakarta: ANDI, 2019), Hal. 186-187

[59]Freddy Rangkuti, Riset Pemasaran, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2006, hlm. 23.

Y = Tingkat Pengangguran Terbuka

X_1 = Jumlah Penduduk

X_2 = Inflasi

a = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi X_1

b_2 = Koefisien regresi X_2

e = standar eror

3. Uji Koefisien determinasi (R^2)

Pada model linear berganda ini, akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R^2). Jika determinasi totalnya (R^2) yang diperoleh mendekati satu maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika determinasi totalnya (R^2) makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.[60]

4. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X_1,X_2) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) atau untuk mengetahui apakah model regresi

[60] Sudjana,*Metode Statistika*,(Bandung: PT.Tarsito, 2017), hlm.373

dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut:[61]

1) Jika Fhitung < Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% (α= 0,05), maka dinyatakan bahwa kedua variabel jumlah penduduk dan inflasi secara simultan tidak mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Dengan demikian alternative (Ha) ditolak dan hipotesis mula-mula (Ho) diterima.
2) Jika Fhitung > Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% (α= 0,05), maka terbukti bahwa kedua variabel jumlah penduduk dan inflasi secara simultan mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka. Dengan demikian alternative (Ha) diterima dan hipotesis mula-mula (Ho) ditolak.

b. Uji Signifikansi Parameter (Uji T)

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel dependen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05.[62]

Untuk menguji pengaruh dari masing-masing variabel bebas secara parsial atau untuk mengetahui variabel mana yang lebih mempengaruhi tingkat pengangguran digunakan uji-t, dengan kaidah pengambilan keputusan sebagai berikut:

---

[61] Dwi Priyanto, *SPSS: 22 Pengolahan Data Terpraktis*, (Yogyakarta: ANDI OFFSET,2014), Hal. 81

[62]Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang : Badan Penerbit-UNDIP, 2013), hlm. 98.

1) Tingkat signifikan yang akan digunakan adalah 0,05 dengan kriteria jika thitung > ttabel maka Ha diterima dan Ho ditolak.
2) Jika thitung < ttabel pada tingkat kepercayaaan 95% (α=0,05), maka Ho diterima dan Ha ditolak.

Adapun untuk uji statistik tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengujian koefisien regresi variabel jumlah penduduk

Ha : Jumlah penduduk berpengaruh secara parsial terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.

Ho : Jumlah penduduk tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka.

b. Pengujian koefisisen regresi variabel inflasi

Ha : Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap variabel tingkat pengangguran terbuka.

Ho : Inflasi tidak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat pengangguran terbuka.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Daerah Sumatera Barat

Daerah Sumatera Barat adalah salah satu dari 33 provinsi di wilayah Indonesia dan terletak di pulau Sumatera. Dengan ibu kota provinsi Padang, berbatasan dengan administrasi yaitu sebelah Utara dengan provinsi Sumatera Utara, sebelah Timur berbatasan dengan daerah Riau dan Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan Bengkulu, dan sebelah Barat Sumudera Hindia.

Gambar 4.1

Peta Administrasi Provinsi Sumatera Barat



Provinsi Sumatera Barat terletak di 0°54'LU dan 3°30'LS dan 98°36'-101°53'BT. Total luas wilayah provinsi Sumatera Barat adalah 42,200 km² atau sama dengan 2,21% dari total wilayah Indonesia. Sumatera Barat

mempunyai iklim tropis dengan rata-rata suhu udara berkisaran antara 21,51°C sampai dengan 31,52°C dan mempunyai kelembaban udara rata-rata 87,03%.[63]

Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat sama seperti provinsi-provinsi lainnya di Indonesia yang memiliki struktur pemerintahan yang dimulai dari gubernur hingga desa. Desa di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari. Nagari merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan istilah asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repuplik Indonesia.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk interim Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2020-2023 (pertengahan tahun/ Juni) sebanyak 5,58 juta jiwa yang terdiri dari 2,81 juta Laki-laki dan 2,77 Juta perempuan dengan rasio jenis kelamin 101,47. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020 (hasil sensus penduduk) jumlah penduduk mengalami penambahan sekitar 4,76 ribu jiwa.

Pada tahun 2021 Sumatera barat mempunyai 19 daerah Kabupaten/ Kota yang terdiri dari 179 Kecamatan, 803 Nagari, 230 Kelurahan dan 126 Desa. Seluruh wilayah administrasi nagari berada pada wilayah kabupaten kecuali untuk kepulauan mentawai yang memiliki wilayah administrasi

[63] BPS Provinsi Sumatera Barat dalam angka 2021

terendah berupa desa. Berikut ini data nama-nama kabupaten/ kota di Sumatera Barat dan luas wilayah :

Tabel 4. 1

Nama-Nama Kabupten/ Kota Di

Sumatera Barat dan Luas Wilayahnya

No	Kabaputen/ Kota	Ibu Kabaputen /Kota	Luas wilayah	
			(km²)	(%)
KABUPATEN				
1.	Kepulauan Mentawai	Tua pejat	6.011,35	14,31
2.	Pesisir Selatan	Painan	5.749,89	13,69
3.	Solok	Aro Suka	3.738,00	8,90
4.	Sijunjung	Muaro Sijunjung	3.130,40	7,45
5.	Tanah Datar	Batusangkar	1.336,10	3,18
6.	Padang Pariaman	Parit Malintang	1.328,79	3,17
7.	Agam	Lubuk Basung	1.804,30	4,29
8.	50 kota	Sarilamak	3.571,14	8,50
9.	Pasaman	Lubuk Sikaping	3.947,63	9,40
10.	Solok Selatan	Padang Aro	3.346,20	7,96
11.	Dhamasraya	Pulau Punjung	2.961,13	7,05
12.	Pasaman Barat	Simpang Empat	3.387,77	9,25
KOTA				
13.	Padang	Padang	693,66	1,65
14.	Solok	Solok	71,29	0,17
15.	Sawahlunto	Sawahlunto	231,93	0,55
16.	Padang Panjang	Padang Panjang	23,00	0,05
17.	Bukittinggi	Bukittinggi	25,24	0,06
18.	Payakumbuh	Payakumbuh	85,22	0,20
19.	Pariaman	Pariaman	66,13	0,16

Sumatera Barat	42.012,89	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik 2021

2. Visi dan misi Sumatera Barat

Adapun visi dan misi daerah Sumatera Barat adalah sebagai berikut: Visi daerah Sumatera Barat ialah "Terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera"

Adapun misi daerah Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah " Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah".
b. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
c. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, dan berkualitas tinggi.
d. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah.
e. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

B. Hasil Analisis Data

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah model regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi

autokorelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi, model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Berikut hasil uji autokorelasi:

Tabel 4.2

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]	
Model	Durbin-Watson
1	0,766
a. Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah Penduduk	
b. Dependent Variable: Pengangguran	

Sumber: Olahan data SPSS versi 26, 2022

Berdasarkan hasil uji autokorelasi yang terdapat pada tabel hasil uji diatas menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson pada model summary adalah sebesar 0,766. Nilai tersebut berada diantara nilai -2 sampai dengan +2 sehingga dapat di indikasi bahwa tidak terjadi autokorelasi.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, jika asumsi ini dilanggar maka uji statistic menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji

Kolmogorov-Smirnov dimana prinsip dari normalitas ditunjukkan dengan signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah dengan melihat probalitas *Asymp.Sig. (2-tailed)* > α, maka data tersebut berdistribusi normal. Adapun hasil pengolahan data uji Kolmogorov- smirnov dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters[a,b]	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	63,49305405
Most Extreme Differences	Absolute	0,128
	Positive	0,128
	Negative	-0,077
Test Statistic		0,128
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Olahan data SPSS versi 26, 2022

Dari tabel 4.3 diatas hasil uji normalitas dengan menggunakan *One- Sample Kolmogorow-Smirnov Test* didapatkan hasil signifikasi dari uji normalitas sebesar 0,200 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikasi 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini adalah berdistribusi normal.

c. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memliki kemiripan antar variabel independen dalam suatu model. Kemiripan antar variabel independen akan mengakibatkan korelasi yang sangat kuat. Selain itu untuk uji ini juga untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika VIF yang dihasilkan diantara 1-10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

Tabel 4.4

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients[a]			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Jumlah Penduduk	0,159	6,295
	Inflasi	0,159	6,295
a. Dependent Variable: Pengangguran			

Sumber: Olahan data SPSS versi 26, 2022

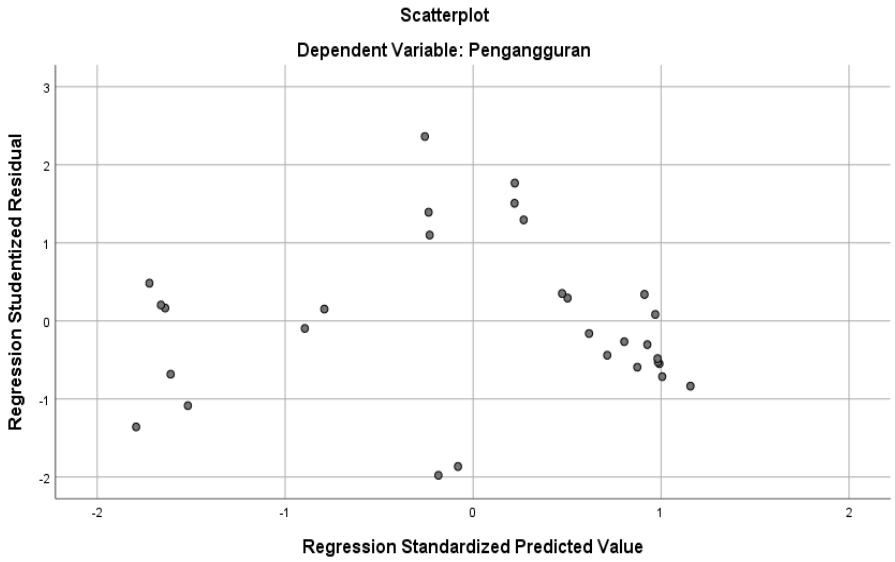
Berdasarkan tabel 4.4 hasil uji multikolinearitas diatas menunjukkan bahwa nilai VIF pada Coefficients adalah sebesar 6,295. Nilai tersebut kecil dari 10 sehingga dapat di indikasi bahwa tidak terjadi Multikolinearitas.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dengan ketentuan yaitu model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas, artinya apabila titik-titik dalam grafik menyebar di atas dan di bawah sumbu angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berkut hasil Uji heteroskedastisitas:

Gambar 4.2

Hasil Uji Hesterokedastisitas



Sumber: Olahan data SPSS versi 26, 2022

Berdasarkan gambar 4.2 hasil uji heteroskedasitas dengan metode grafik (melihat pola titik-titik pada grafik regresi), tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedasitas.

2. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dimaksudkan untuk melihat seberapa besar pengaruh antara variabel independent terhadap variabel dependent.

Tabel 4.5

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients[a]				
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	917,418	729,609	
	Jumlah Penduduk	-19,990	21,123	-0,354
	Inflasi	30,646	12,174	0,941
a. Dependent Variable: Pengangguran				

Sumber: Olahan data SPSS versi 26, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat ditulis persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$

$Y = 917,418 – 19,990X_1 + 30,646X_2$

Interpretasi dari persamaan regresi di atas adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan persamaan regresi linear berganda diatas dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien konstanta sebesar 917,418, artinya jika Jumlah Penduduk (X_1) dan Inflasi (X_2) di asumsikan konstan/ tetap maka nilai jumlah Pengangguran (Y) sebesar nilai (a) 917,418 satuan.

b. Koefisien Jumlah Penduduk (X_1) memberikan nilai sebesar -19,990 satuan, hal ini dapat diartikan setiap kenaikan satu satuan Jumlah Penduduk (X_1) maka menyebabkan Pengangguran (Y) mengalami penurunan sebesar 19,990 satuan.

c. Koefisien Inflasi (X_2) memberikan nilai sebesar 30,646 satuan, hal ini dapat diartikan setiap kenaikan satu satuan Inflasi (X_2) maka Pengangguran (Y) mengalami peningkatan sebesar 30,646 satuan.

3. Koefisien Determinasi (*R- square*)

Uji ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh kemampuan model menerangkan varians variabel dependen. Dalam penelitian regresi linear sederhana koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai *R-Square*. Nilai koefisien determinasi berkisar 0 - 1. Jika (*R-Square*) semakin besar (mendekati satu), maka dapat dikatakan bahwa kemampuan menjelaskan variabel bebas (X) adalah besar terhadap variabel terikat (Y), sebaliknya.

Tabel 4.6

Hasil Uji Koefisien determinasi (*R-square*)

Model Summary[b]		
Model	R	R Square
1	,633[a]	0,400
a. Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah Penduduk		
b. Dependent Variable: Pengangguran		

Sumber: Olahan data SPSS versi 26, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, diperoleh nilai R sebesar 0,633 artinya semua variabel indenpenden (jumlah penduduk dan inflasi) memiliki

hubungan/korelasi sedang terhadap variabel dependen (pengangguran) di Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan kontribusi/ sumbangan secara keseluruhan dari variabel indenpenden (jumlah penduduk dan inflasi) terhadap variabel dependen (pengangguran) sebesar nilai R^2 yaitu sebesar 0,40. Sisanya sebesar 0,60 / 60% variabel pengangguran di pengaruhi oleh variabel indenpenden lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, adapun variabel yang tidak diteliti itu adalah pertumbuhan ekonomi dan upah.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji- T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh signifikansi terhadap kinerja Keuangan. Dimana dasar pengambilan Keputusan dari Uji t ini adalah:

1) Jika nilai Sig < 0.05, atau $thitung > ttabel$ maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.
2) Jika nilai Sig > 0.05, atau $thitung < ttabel$ maka tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y.

Sedangkan hasil dari *t tabel* adalah :

Uji *t tabel* = t (α/2 : n - k-1)

= t (0,05/2 : 30- 3-1)

= (0,025 : 26)

= 2.056 (nilai *t tabel* yang didapat dari tabulasi *t tabel*)

Adapun hasil dari perhitungan uji t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7

Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Coefficients[a]			
Model		T	Sig.
1	(Constant)	1,257	0,219
	Jumlah Penduduk	-0,946	0,352
	Inflasi	2,517	0,018
a. Dependent Variable: Pengangguran			

Sumber: Olahan data SPSS versi 26, 2022

1) Hipotesis Jumlah Penduduk (X_1)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan dari uji t untuk variabel Jumlah Penduduk ialah sebesar 0,352 artinya nilai Sig. 0.352 > 0,05. Dan jika dilihat dari hasil t hitung ialah (-0,946 < 2,056). Dapat disimpulkan bahwa tidak memiliki pengaruh signifikan antara Jumlah Penduduk terhadap pengangguran di provinsi Sumatera Barat.

2) Hipotesis Inflasi (X_2)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.7 diatas dapat dilihat bahwa nilai signifikan dari uji t untuk variabel Inflasi ialah sebesar 0,018 artinya nilai Sig. (0.018 < 0,05). dan jika dilihat dari t hitung ialah (2,517 > 2,056). sehingga dapat

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara Inflasi terhadap pengangguran di provinsi Sumatera Barat.

b. Uji Simultan (Uji- F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan yang digunakan dalam pengujian ini adalah 5% artinya kemungkinan kesalahan yang dapat ditoleransi dalam pengambilan keputusan adalah 5%. Apabila nilai *f* hitung > dan signifikan F < 0,05, maka dinyatakan Ha diterima dan apabila nilai *f hitung* > *f tabel* dan signifikan F < 0,05, maka dinyatakan bahwa Ha ditolak.

Sedangkan hasil dari *f tabel* sendiri ialah:

1) Uji *f tabel* df untuk pembilang (N1)

Df (N1) = k – 1

= 3 – 1

= 2

2) Uji *f tabel* df untuk penyebut (N2)

Df (N2) = n – k

= 30 – 3

= 27

Hasil Uji *f tabel* = 3.35 (nilai *f tabel* yang didapat dari tabulasi *f tabel*).

Adapun hasil dari uji simultan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8

Hasil Uji Simultan F

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	78028,755	2	39014,377	9,010	,001[b]
	Residual	116909,669	27	4329,988		
	Total	194938,424	29			
a. Dependent Variable: Pengangguran						
b. Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah Penduduk						

Sumber: Olahan data SPSS versi 26, 2022

Berdasarkan Tabel ANOVA atau Uji F yang terdapat pada tabel 4.8 maka dapat diketahui bahwa nilai sig 0.001 < 0.05 artinya Ho di tolak dan Ha diterima. Atau jika dilihat dari perbandingan *f hitung* dan *f tabel* ialah nilai dari *f hitung* 9,010. Sedangkan *f hitung* > *f tabel* (9,010 > 3,35) maka dapat dikatakan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau secara Bersama sama ada pengaruh yang signifikan antara Jumlah Penduduk dan Inflasi terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat.

C. Pembahasan

Penelitian ini berjudul pengaruh jumlah penduduk dan inflasi terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Barat diolah dengan menggunakan SPSS Statistik *version* 26 :

1. Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran.

Berdasarkan tabel output SPSS versi 26 diatas, Hasil uji t menunjukkan sebesar *t hitung*= - 0,946 < *t tabel* = 2,056 serta didapat nilai signifikan lebih besar dari 0,05 (0,352 > 0,05). Maka $H0_1$ diterima dan Ha_1 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat tahun 1992- 2021, yang artinya bahwa H01 diterima sehingga Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat. Hal tersebut berarti meningkat atau menurunnya jumlah penduduk tidak mempengaruhi pengangguran di Provinsi Sumatera Barat tahun 1992-2021.

Hasil penelitian ini tidak mendukung teori dari Sukirno, dimana jumlah penduduk yang semakin meningkat maka pengangguran juga akan meningkat. Sebaliknya jika jumlah penduduk menurun maka pengangguran juga akan menurun. Pengaruh yang tidak siginifikan pada jumlah penduduk terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Barat ini disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan disetiap tahun nya, adanya kebiasaan merantau masyarakat Provinsi Sumatera Barat dan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor di tahun 2020 -2021. Selain itu pada Februari 2021 sebanyak 1,64 juta jiwa penduduk Sumatera Barat yang bekerja di kegiatan informal,

turun 2,69% poin dibanding Agustus 2020. Hal ini ditunjukkan juga dari meningkatnya penduduk bekerja yang berstatus buruh/ karyawan/ pegawai dari 30,13% pada Agustus 2020 menjadi 32,58%. Dan Provinsi Sumatera Barat memiliki tradisi merantau dimana banyak masyarakat Sumatera Barat yang memilih bekerja ke daerah lain sehingga pengangguran di daerah asal nya menjadi berkurang. Dan pada sisi lain pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat yang saat ini tumbuh cukup baik sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Dengan banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh pasar tenaga kerja akan membuat pengangguran di Provinsi Sumatera Barat akan menjadi berkurang hal ini dapat dilihat dari PDRB berdasarkan harga konstan di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami peningkatan di setiap tahun nya yaitu pada tahun 2020 sebesar 30.694.420,00 juta dan pada tahun 2021 sebesar 31.360.000,00 juta.

Turunnya angka TPT dan meningkatnya orang bekerja ini menunjukkan program perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan penciptaan wirausaha baru, inkubasi bisnis, dan padat karya yang memperoleh anggaran tambahan jaring pengaman sosial telah memberi kan hasil pada paruh awal 2021.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Valentina Brahma Putri Sembiring[64] dkk tahun 2019 yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Indonesia periode 2011

[64] Valentina Brahma Putri Sembiring, Gatot Sasongko. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2011- 2017.* International Journal of Social Science and Business. Vol.3(4). 2019. Hal. 430- 443.

-2017. Hasil ini juga di dukung oleh penelitian Lusia Fransiska Bantu dkk tahun 2022 yang menyatakan bahwa Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Kota Manado periode 2005 – 2020.[65]

2. Inflasi Terhadap Pengangguran

Berdasarkan tabel output SPSS versi 26 di atas, Hasil uji t menunjukkan sebesar *t hitung*= 2,517 > *t tabel* = 2,056 serta di dapatkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 (0,018 < 0,05). Maka Ha_2 diterima dan $H0_2$ ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat tahun 1992-2021. Hal ini berarti setiap inflasi naik satu satuan maka tingkat pengangguran akan meningkat sebesar 0,018. Naiknya tingkat inflasi dapat menyebabkan tingkat pengangguran meningkat dan begitu pula sebaliknya jika inflasi rendah maka pengangguran akan menurun.

Inflasi diasumsikan sebagai kenaikan permintaan. Saat terjadi kenaikan permintaan, produsen meningkatkan jumlah produksinya. Karena keterbatasan bahan baku, produsen menaikan harga produknya agar mendapatkan laba. Saat terjadi situasi seperti itu, masyarakat akan lebih memilih barang pengganti atau substitusi dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah sehingga produsen mengalami kerugian dan banyak memecat tenaga kerjanya sehingga tingkat pengangguran menjadi meningkat.

---

[65] Lusia Fransiska Bantu, Ita Pingkan F Rorong, Jacline I Sumuel. *Analisis Upah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Kota Manado Periode 2005 – 2020*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 22(6). 2020. Hal 49 – 60.

Dari hasil penelitian ini maka, penggambaran dari kurva Phillips yang menghubungkan inflasi dengan pengangguran, dimana inflasi dan pengangguran mempunyai hubungan yang terbalik di dalam kurva Philips, penelitian ini untuk di Provinsi Sumatera Barat tidak tepat digunakan sebagai kebijakan untuk menekan tingkat pengangguran yang ada karena dalam kurva Philips ini hanya berlaku pada saat tingkat inflasi tinggi dan pada waktu jangka pendek saja. Oleh karena itu, Analisis A.W. Phillips melalui kurva yang dikenal dengan kurva Phillips tidak sesuai dengan kondisi inflasi dan pengangguran di Provinsi Sumatera Barat. Menurut seseorang ekonom Amerika dan intelektual publik Milton Friedman, berlaku harga fleksibel pada saat jangka panjang, dengan kata lain, tingkat pengangguran bagaimanapun juga pada tingkat alamiahnya, sehingga hubungan yang terjadi antara inflasi dan pengangguran ini menjadi positif.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Yeny Dharmayanti tahun 2011 yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah tahun 1991 - 2009[66]. Hasil ini juga di dukung oleh penelitian Mahanata Giri Prayuda dkk tahun 2015 yang menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Bali Tahun 1994 – 2013.[67]

[66] Yeny Dharmayanti, Hastarini Dwi Atmanti. *Analisis Pengaruh PDRB Upah dan Inflasi Terhadap Pengagguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991 – 2009.* Universitas Diponegoro. 2011.

[67] Mahanata Giri Prayuda, Urmila Dewi, Made Henny. *Pengaruh Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Bali tahun 1994 – 2013*. E – Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 5 (1) 2015.

3. Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pengangguran

Berdasarkan hasil uji f diketahui bahwa nilai fhitung > ftabel dengan nilai 9,010 > 3,35 dan nilai probabilitas value atau taraf signitifikansi adalah 0,001 < 0,05. Sehingga hasil hipotesis yaitu H_1 ditolak dan Ho diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel jumlah penduduk (X_1), dan inflasi (X_2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengangguran (Y).

Teori hubungan antar variabel yaitu *Satu,* pengaruh jumlah penduduk terhadap pengangguran yang mana menurut sukirno Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu. Jadi menurut Sukirno jika jumlah penduduk mengalami peningkatan maka pengangguran juga meningkat hal ini disebabkan karena tidak sebandingnya jumlah lowongan kerja yang tersedia dengan perkembangan jumlah angkatan kerja.

Kedua, pengaruh inflasi terhadap pengangguran yang mana Inflasi dapat berpengaruh secara negatif maupun positif. Inflasi berpengaruh terhadap pengangguran secara positif apabila inflasi tersebut terjadi dalam jangka pendek. Inflasi diasumsikan sebagai kenaikan permintaan. Saat terjadi kenaikan permintaan, produsen meningkatkan jumlah produksinya.

Karena keterbatasan bahan baku, produsen menaikan harga produknya agar mendapatkan laba. Saat terjadi situasi seperti itu, masyarakat akan lebih memilih barang pengganti atau substitusi dengan kualitas yang sama dengan harga yang lebih murah sehingga produsen mengalami kerugian dan banyak memecat tenaga kerjanya sehingga tingkat pengangguran menjadi meningkat. Tapi hal itu tidak akan terjadi untuk jangka panjang karena persediaan barang pengganti juga akan habis. Sehingga dengan habisnya persediaan barang pengganti menyebabkan masyarakat kembali pada produk pertamanya walaupun harganya mahal agar tetap bisa memenuhi kebutuhan. Dengan kembali banyaknya permintaan, produsen akan meningkatkan produksinya sehingga banyak membutuhkan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran dapat terserap. Dan apabila inflasi terjadi dalam jangka panjang, maka akan berpengaruh negatif terhadap pengangguran.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X_1, X_2) berpengaruh signifikan terhadap pengangguran (Y). Variabel jumlah penduduk dan inflasi sangat berperan penting dalam mengatasi pengangguran jika antara salah satu variabel tidak terpenuhi maka masalah pengangguran yang di atasi tidak akan teratasi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Ayudha Lindiarta tahun 2013 yang menyatakan bahwa variabel UMK, Inflasi, Jumlah Penduduk, secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguran di

Kota Malang tahun 1996 – 2013.[68] Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian Boriston Siahaan tahun 2018 yang menyatakan bahwa variabel Jumlah Penduduk, PMDN, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi Secara Simultan bersama- sama berpengaruh signifikan terhadap pengangguran di indonesia tahun 2000 – 2018.[69]

[68] Ayudha Lindiarta. Analisis Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Inflasi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Kota Malang tahun 1996 – 2013. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 2(2). 2013.

[69] Boriston Siahaan. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PMDN, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi, terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2000 – 2018*. Repository Universitas HKBP Nommensen. 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka kesimpulan yang di peroleh dari penelitian yang berjudul pengaruh jumlah penduduk dan inflasi terhadap Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Berdasarkan jumlah penduduk (X_1) terhadap Pengangguran (Y) yaitu negatif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Barat dengan hasil uji t sebesar t hitung -0,946 kecil dari pada nilai t tabel sebesar 2,056. Dan nilai sig 0,352 besar dari nilai sig 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah penduduk (X_1) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pengangguran (Y) di Provinsi Sumatera Barat. Pengaruh yang tidak siginifikan pada jumlah penduduk terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Barat ini disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan disetiap tahun nya, adanya kebiasaan merantau masyarakat Provinsi Sumatera Barat dan pertumbuhan ekonomi yang relatif baik sehingga mampu menyerap tenaga kerja.
2. Berdasarkan pengaruh inflasi(X_2) terhadap pengangguran (Y) yaitu positif dan signifikan terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Barat dengan hasil uji t sebesar t hitung 2,517 besar dari pada nilai t tabel 2,056. Dan nilai sig sebesar 0,018 kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan H_1 ditola.

3. Secara simultan semua variabel independen (X_1, X_2) terhadap pengangguran (Y) yaitu berpengaruh positif dan signifikan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah
   a. Diharapkan kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat agar dapat mempertahankan serta meningkatkan mutu dari jumlah penduduk diantaranya yaitu dengan cara menyelenggrakan pendidikan, pelatihan, penyuluhan bagi pencari kerja sehingga pengangguran akan menurun.
   b. Diharapkan kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat agar mampu untuk menyiasati permasalahan inflasi yang relatif tidak stabil yaitu dengan cara memberikan kemudahan bagi calon investor dala hal penanaman modal, dan menjamin keamanan berinvestasi di Sumatera Barat serta mempromosikan potensi yang dapat dikembangkan di daerah Sumatera Barat.
   c. Diharapkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pelatihan kepada para pencari kerja supaya pencari kerja murah terserap di pasar tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Provinsi Sumatera Barat.

2. Bagi masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat sebagai pelaku kendali pemerintah dapat mendukung program pemerintah dengan memberikan kritikan dan saran terhadap kinerja pemerintah daerah yang ada jika dilihat dari segi jumlah penduduk, inflasi dan masalah pengangguran. Selain itu, masyarakat juga bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang lebih baik lagi dengan cara yang sesuai ketentuan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitan selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian lanjut, dengan cara memperdalam atau mengembangkan penelitian ini. Pengkajian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru yang dapat bermanfaat bagi perkembangkan ilmu ekonomi Islam terkait dengan masalah pengangguran.

DAFTAR PUSTAKA

Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Arsyad Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan STIM YKPN.

Atmaja Lukas Setia. 2019. *Statistik Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: ANDI.

Bambang Joni. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung Pustaka Setia.

Bantu Lusia Fransiska, Ita Pingkan F Rorong, Jacline I Sumuel. 2020. *Analisis Upah dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Kota Manado Periode 2005 – 2020*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 22(6).

Barthos Basir. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu Pendekatan Makro*. Jakarta: Bumi Aksara.

Bidarti Agustina. 2020. *Teori Kependudukan*. Bogor: Lindan Bestari.

BPS Indonesia, 2021. Https://Www.Bps.Go.Id

BPS Indonesia. 2021. Https://Bps.Go.Id

BPS Provinsi Sumatera Barat. 2021. Https://Sumbar.Bps.Go.Id

BPS Provinsi Sumatera Barat. 2021. Https://Sumbar.Bps.Go.Id

Dharmayanti Yeny, Hastarini Dwi Atmanti. 2011. *Analisis Pengaruh PDRB Upah dan Inflasi Terhadap Pengagguran Terbuka di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1991 – 2009*. Universitas Diponegoro.

Ghozali Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Badan Penerbit-UNDIP.

Hasan Iqbal. 2008. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hasyim Ali Ibrahim. 2016. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Kencana.

Huda Nurul, Dkk. 2015.*Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hutasoit Imelda. 2017.*Pengantar Ilmu Kependudukan*. Bandung: Alfabeta.

Ibrahim Zaini. 2013. *Pengantar Ekonomi Makro.*Banten: KOPSYAH BARAKA.

Ibrahim Zaini. 2013.*Pengantar Ekonomi Makro Edisi Revisi*. Serang: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Jhingan, M, L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Karim Adiwarman A. 2012. *Ekonomi Makro Islami Edisi Kedua.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Karim Adiwarman. 2014. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kuncoro Mudrajad. 2010. *Ekonomika Pembangunan. Masalah, Kebijakan, dan Politik.* Jakarta: Erlangga.

Latumaerissa Julius R. 2015. *Perekonomian Indonesia Dan Dinamika Ekonomi Global.* Jakarta: Mitra Wacana Media.

Lindiarta Ayudha. 2013. *Analisis Pengaruh Tingkat Upah Minimum, Inflasi, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Kota Malang tahun 1996 – 2013*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Vol. 2(2).

Mulyadi. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan.* Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Noor Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.

Prasetyo P. Eko. 2013. *Fundamental Makro Ekonomi*. Yogyakarta: Beta Offset.

Prayuda Mahanata Giri, Urmila Dewi, Made Henny. 2015. *Pengaruh Inflasi dan Investasi Terhadap Pengangguran di Provinsi Bali tahun 1994 – 2013.* E – Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol. 5 (1).

Priyanto Dwi. 2014. *SPSS: 22 Pengolahan Data Terpraktis.* Yogyakarta: ANDI OFFSET.

Q.S. Al- Jumu‟ah:10

Q.S.An-Nisa: 9

QS. An-Nahl (16) : 97

QS. Ar-Ruum (30) : 41

Rangkuti Freddy. 2006. *Riset Pemasaran*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

SasmitaRahardjo Adi. 2013.*Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pertumbuhan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sembiring Valentina Brahma Putri, Gatot Sasongko. 2019. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Inflasi, Upah Minimum, dan Jumlah Penduduk Terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2011- 2017.* International Journal of Social Science and Business. Vol.3(4).

Siahaan Boriston. 2020. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PMDN, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi, terhadap Pengangguran Terbuka di Indonesia tahun 2000 – 2018.* Repository Universitas HKBP Nommensen.

Subagyo Joko. 2011.*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*.Bandung: Alfabeta.

Sudarmanto Eko Dkk. 2021.*Ekonomi Pembangunan Islam: Cetakan 1*, Yayasan Kita Menulis.

Sudjana. 2017.*Metode Statistika*. Bandung: PT. Tarsito.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Rdan D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Rdan D.* Bandung: Alfabeta.

Suharsaputra Uhar.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, Bandung: Refika Aditama.

Sujarweni V. Wiratna. 2015.*SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta:Pustaka Baru Pers.

Sukirno Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sukirno Sadono. 2013. *Makro Ekonomi: Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sukirno Sadono. 2016. *Makro Ekonomi Teori Pengantar Ed.*3. Jakarta: Rajawali Pers.

Suparmoko. 2009. *Pengantar Ekonomika Makro*. Yogyakarta- BPFE.

Suparmono. 2004. *Pengantar Ekonomika Makro.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Surakhmad.2012. *Inofasi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.

Todaro Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*, Edisi 7. Jilid 1, (Jakarta :PT. Gelora Aksara Pratama, : Penerbit Erlangga.

Uwiyono Aloysius, Siti Hajati Hoesin, Widodo Suryandono, Melania Kiswandari. 2014. *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Yuliadi Imamudin. 2019. *Teori Ekonomi Makro Islam*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Yuniarti Vinna Sri. 2016. *Ekonomi* Islam. Bandung: Pustaka Setia.

Zuriah,Nurul. 2007. *Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan Teori Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Lampiran 1

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI

Nomor : 106.1/In.26.3/PP.00.9/03/2022

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi an **Ismail** NIM. **3218157** tanggal 14 Maret 2022

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4301);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 181 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 385);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 jo Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1598);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1328);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **" Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Di Provinsi Sumatera Barat"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Amsah Hendri Doni, SE, ME**
NIDN	:	2001028702
Pangkat/Gol.Ruang	:	Asisten Ahli
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Ekonomi
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Statistik
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 14 Maret 2022
Dekan,

IZZUDDIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran II

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih Kab.Agam - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.febi.iainbukittinggi.ac.id | e-mail : febi@iainbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0950/In.26.3/TL.00/04/2022 04 April 2022
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Observasi**

Yth. : Kepala Kantor Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan observasi kepada mahasiswa dibawah ini::

Nama	: **Ismail**
NIM	: 3218157
Semester	: VIII (delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: ***"Pengaruh Jumlah Penduduk Dan Inflasi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Sumatera Barat"***
Lokasi Penelitian	: Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
Waktu	: 05 April s.d 05 Mei 2022

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Dekan,

Dr. Ilz Izmuddin, MA
NIP. 19750303200112100 7

Lampiran III

Data Jumlah Penduduk, Inflasi dan Pengangguran di Provinsi Sumatera Barat

Data Penelitian			
Tahun	Jumlah pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Inflasi
1991	48084	1630509	8,44
1992	49926	1659931	8,69
1993	37757	1836840	9,5
1994	95393	1840536	10,33
1995	59313	1822590	11,2
1996	86414	1874792	12,02
1997	86985	1943865	13,31
1998	100079	1959598	24,93
1999	113948	1937009	25,99
2000	58800	1707770	28,85
2001	64725	1732008	31,7
2002	182148	1894180	34,94
2003	198856	1947876	36,86
2004	258224	2026590	39,44
2005	225860	1963332	47,52
2006	243525	2051800	51,35
2007	217305	2106711	54,9
2008	171134	2127512	61,87
2009	173080	2172002	63,14
2010	152586	2194040	68,1
2011	142788	2213513	71,76
2012	142184	2179826	74,75
2013	154955	2387045	82,88
2014	158236	2502702	92,48
2015	148677	2480828	93,48
2016	149687	2577041	98,06
2017	151900	2617874	100,05
2018	141680	2552130	102,66
2019	142244	2687045	104,37
2020	190609	2772133	105,32
2021	179948	2761392	106,79

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat

Tabel / Table 03.1

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu
Population 15 Years of Age and Over by Province and Type of Activity During the Previous Week
(Agustus/August 2021)

Perkotaan+Perdesaan/*Urban+Rural* — Laki-laki+Perempuan/*Male+Female*

Provinsi *Province*	Angkatan Kerja/*Economically Active*					Bukan Angkatan Kerja/*Not Economically Active*				Jumlah *Total*	% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja *% Working to Economically Active*	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) *Unemployment Rate (%)*	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) *% Economically Active to Working Age Population*
	Bekerja *Working*	Pengangguran *Unemployment *)*			Jumlah Angkatan Kerja *Total Economically Active*	Sekolah *Attending School*	Mengurus Rumah Tangga *House Keeping*	Lainnya *Others*	Jumlah *Total*				
		Pernah Bekerja *Ever Worked*	Tidak Pernah Bekerja *Never Worked*	Jumlah *Total*									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	2 361 300	42 389	116 468	158 857	2 520 157	328 898	816 171	286 142	1 431 211	3 951 368	93,70	6,30	63,78
Sumatera Utara	7 035 850	222 142	253 014	475 156	7 511 006	819 733	1 982 377	556 649	3 358 759	10 869 765	93,67	6,33	69,10
Sumatera Barat	2 581 444	93 464	86 484	179 948	2 761 392	385 915	723 072	207 249	1 316 236	4 077 628	93,48	6,52	67,72
Riau	3 148 947	78 151	67 518	145 669	3 294 616	397 560	1 137 529	236 982	1 772 071	5 066 687	95,58	4,42	65,03
Jambi	1 746 840	36 856	56 898	93 754	1 840 594	196 461	546 584	156 538	899 583	2 740 177	94,91	5,09	67,17
Sumatera Selatan	4 179 708	94 150	125 049	219 199	4 398 907	430 292	1 209 609	357 799	1 997 700	6 396 607	95,02	4,98	68,77
Bengkulu	1 021 775	18 128	20 617	38 745	1 060 520	116 606	281 993	61 311	459 910	1 520 430	96,35	3,65	69,75
Lampung	4 284 320	109 028	101 604	210 632	4 494 952	408 595	1 312 873	264 769	1 986 237	6 481 189	95,31	4,69	69,35
Kepulauan Bangka Belitung	701 441	20 329	16 847	37 176	738 617	71 729	266 554	44 178	382 461	1 121 078	94,97	5,03	65,88
Kepulauan Riau	1 087 419	80 281	39 314	119 595	1 207 014	149 288	336 479	75 198	560 965	1 767 979	90,09	9,91	68,27
DKI Jakarta	4 737 415	206 825	233 074	439 899	5 177 314	669 558	1 838 599	580 885	3 089 042	8 266 356	91,50	8,50	62,63
Jawa Barat	22 313 481	1 265 642	1 164 505	2 430 147	24 743 628	2 756 732	8 279 509	2 315 101	13 351 342	38 094 970	90,18	9,82	64,95
Jawa Tengah	17 835 770	731 226	396 997	1 128 223	18 963 993	1 795 640	4 992 955	1 501 326	8 289 921	27 253 914	94,05	5,95	69,58
D.I. Yogyakarta	2 228 523	73 823	32 609	106 432	2 334 955	253 480	472 342	115 012	840 834	3 175 789	95,44	4,56	73,52
Jawa Timur	21 037 750	673 085	608 310	1 281 395	22 319 145	2 042 868	5 941 321	1 582 369	9 566 558	31 885 703	94,26	5,74	70,00
Banten	5 698 344	245 670	316 640	562 310	6 260 654	728 891	2 054 954	769 835	3 553 680	9 814 334	91,02	8,98	63,79
Bali	2 441 854	101 448	37 221	138 669	2 580 523	261 135	532 709	134 723	928 567	3 509 090	94,63	5,37	73,54
Nusa Tenggara Barat	2 657 395	58 603	23 892	82 495	2 739 890	248 399	701 738	192 433	1 142 570	3 882 460	96,99	3,01	70,57
Nusa Tenggara Timur	2 808 620	41 550	68 378	109 928	2 918 548	298 015	554 162	184 852	1 037 029	3 955 577	96,23	3,77	73,78
Kalimantan Barat	2 482 453	75 443	77 864	153 307	2 635 760	270 636	731 631	212 821	1 215 088	3 850 848	94,18	5,82	68,45
Kalimantan Tengah	1 346 437	24 205	39 669	63 874	1 410 311	133 811	421 351	88 406	643 568	2 053 879	95,47	4,53	68,67
Kalimantan Selatan	2 109 427	59 272	50 696	109 968	2 219 395	215 978	634 127	135 019	985 124	3 204 519	95,05	4,95	69,26
Kalimantan Timur	1 720 361	61 772	64 414	126 186	1 846 547	228 949	609 254	134 815	973 018	2 819 565	93,17	6,83	65,49
Kalimantan Utara	338 152	7 383	8 841	16 224	354 376	40 437	112 655	27 539	180 631	535 007	95,42	4,58	66,24
Sulawesi Utara	1 126 797	35 769	49 771	85 540	1 212 337	138 685	450 870	148 866	738 421	1 950 758	92,94	7,06	62,15
Sulawesi Tengah	1 524 730	23 587	35 784	59 371	1 584 101	148 155	460 431	112 223	720 809	2 304 910	96,25	3,75	68,73
Sulawesi Selatan	4 160 433	109 002	143 347	252 349	4 412 782	464 500	1 537 499	402 819	2 404 818	6 817 600	94,28	5,72	64,73
Sulawesi Tenggara	1 327 069	26 151	27 983	54 134	1 381 203	150 296	377 233	61 996	589 525	1 970 728	96,08	3,92	70,09
Gorontalo	579 009	9 010	8 949	17 959	596 968	64 609	200 250	43 534	308 393	905 361	96,99	3,01	65,94
Sulawesi Barat	686 544	10 861	11 347	22 208	708 752	57 764	204 141	37 994	299 899	1 008 651	96,87	3,13	70,27
Maluku	800 755	18 764	40 825	59 589	860 344	100 754	245 854	101 591	448 199	1 308 543	93,07	6,93	65,75
Maluku Utara	568 698	8 803	19 330	28 133	596 831	66 609	200 241	58 755	325 605	922 436	95,29	4,71	64,70
Papua Barat	483 681	10 319	19 666	29 985	513 666	57 470	122 208	36 907	216 585	730 251	94,16	5,84	70,34
Papua	1 887 781	12 037	52 959	64 996	1 952 777	145 994	288 668	106 703	541 365	2 494 142	96,67	3,33	78,29
Jumlah/*Total*	131 050 523	4 685 168	4 416 884	9 102 052	140 152 575	14 644 442	40 577 943	11 333 339	66 555 724	206 708 299	93,51	6,49	67,80

https://www.bps.go.id

Catatan/*Note*:

*) Lihat Penjelasan Tabel 01/*Look at Note on Table 01*

Tabel / Table 03.1

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu
Population 15 Years of Age and Over by Province and Type of Activity During the Previous Week
(Agustus/*August* 2020)

Perkotaan+Perdesaan/*Urban+Rural* — Laki-laki+Perempuan/*Male+Female*

Provinsi *Province*	Angkatan Kerja/*Economically Active*					Bukan Angkatan Kerja/*Not Economically Active*				Jumlah *Total*	% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja *% Working to Economically Active*	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) *Unemployment Rate (%)*	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) *% Economically Active to Working Age Population*
	Bekerja *Working*	Pengangguran Terbuka *Unemployment *)*			Jumlah Angkatan Kerja *Total Economically Active*	Sekolah *Attending School*	Mengurus Rumah Tangga *House Keeping*	Lainnya *Others*	Jumlah *Total*				
		Pernah Bekerja *Ever Worked*	Tidak Pernah Bekerja *Never Worked*	Jumlah *Total*									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	2 359 905	63 690	102 910	166 600	2 526 505	364 266	763 324	227 007	1 354 597	3 881 102	93,41	6,59	65,10
Sumatera Utara	6 842 252	281 623	226 182	507 805	7 350 057	856 408	2 037 013	459 833	3 353 254	10 703 311	93,09	6,91	68,67
Sumatera Barat	2 581 524	106 714	83 895	190 609	2 772 133	375 778	698 495	170 370	1 244 643	4 016 776	93,12	6,88	69,01
Riau	3 022 988	113 177	90 660	203 837	3 226 825	416 163	1 116 111	187 006	1 719 280	4 946 105	93,68	6,32	65,24
Jambi	1 739 003	43 312	50 678	93 990	1 832 993	213 137	530 289	127 434	870 860	2 703 853	94,87	5,13	67,79
Sumatera Selatan	4 091 383	114 016	124 347	238 363	4 329 746	472 024	1 222 618	282 624	1 977 266	6 307 012	94,49	5,51	68,65
Bengkulu	1 031 881	24 819	18 982	43 801	1 075 682	120 347	250 580	52 963	423 890	1 499 572	95,93	4,07	71,73
Lampung	4 280 109	130 101	79 467	209 568	4 489 677	434 474	1 253 849	221 544	1 909 867	6 399 544	95,33	4,67	70,16
Kepulauan Bangka Belitung	699 881	25 966	12 790	38 756	738 637	73 062	249 873	42 647	365 582	1 104 219	94,75	5,25	66,89
Kepulauan Riau	1 016 600	85 859	31 317	117 176	1 133 776	153 357	359 942	63 519	576 818	1 710 594	89,66	10,34	66,28
DKI Jakarta	4 659 251	353 138	219 642	572 780	5 232 031	725 470	1 819 345	422 848	2 967 663	8 199 694	89,05	10,95	63,81
Jawa Barat	21 674 854	1 531 434	1 001 642	2 533 076	24 207 930	2 868 186	8 520 311	1 916 405	13 304 902	37 512 832	89,54	10,46	64,53
Jawa Tengah	17 536 935	832 625	381 717	1 214 342	18 751 277	1 787 373	5 190 617	1 280 029	8 258 019	27 009 296	93,52	6,48	69,43
D.I. Yogyakarta	2 126 316	72 618	29 228	101 846	2 228 162	277 808	526 850	99 934	904 592	3 132 754	95,43	4,57	71,12
Jawa Timur	20 962 967	772 402	528 743	1 301 145	22 264 112	2 095 398	5 901 685	1 397 016	9 394 099	31 658 211	94,16	5,84	70,33
Banten	5 552 172	390 906	270 155	661 061	6 213 233	785 153	2 075 075	562 599	3 422 827	9 636 060	89,36	10,64	64,48
Bali	2 423 419	123 217	21 283	144 500	2 567 919	265 941	497 389	123 878	887 208	3 455 127	94,37	5,63	74,32
Nusa Tenggara Barat	2 575 956	82 966	30 464	113 430	2 689 386	257 388	687 898	183 024	1 128 310	3 817 696	95,78	4,22	70,45
Nusa Tenggara Timur	2 725 955	50 042	71 842	121 884	2 847 839	336 572	559 986	151 056	1 047 614	3 895 453	95,72	4,28	73,11
Kalimantan Barat	2 458 296	83 961	67 600	151 561	2 609 857	281 342	705 440	195 017	1 181 799	3 791 656	94,19	5,81	68,83
Kalimantan Tengah	1 318 133	29 350	33 959	63 309	1 381 442	145 995	420 579	71 501	638 075	2 019 517	95,42	4,58	68,40
Kalimantan Selatan	2 083 319	68 220	35 428	103 648	2 186 967	232 724	608 441	126 267	967 432	3 154 399	95,26	4,74	69,33
Kalimantan Timur	1 692 796	72 347	52 537	124 884	1 817 680	230 776	611 283	115 432	957 491	2 775 171	93,13	6,87	65,50
Kalimantan Utara	330 441	9 485	7 805	17 290	347 731	42 541	108 106	24 454	175 101	522 832	95,03	4,97	66,51
Sulawesi Utara	1 134 802	48 314	41 934	90 248	1 225 050	144 774	444 262	117 550	706 586	1 931 636	92,63	7,37	63,42
Sulawesi Tengah	1 516 347	29 212	30 169	59 381	1 575 728	171 255	428 895	93 266	693 416	2 269 144	96,23	3,77	69,44
Sulawesi Selatan	4 006 620	141 411	128 406	269 817	4 276 437	499 293	1 629 166	340 025	2 468 484	6 744 921	93,69	6,31	63,40
Sulawesi Tenggara	1 289 232	32 342	29 518	61 860	1 351 092	154 624	363 818	65 268	583 710	1 934 802	95,42	4,58	69,83
Gorontalo	568 563	14 125	11 285	25 410	593 973	67 189	194 191	38 392	299 772	893 745	95,72	4,28	66,46
Sulawesi Barat	672 986	12 510	10 622	23 132	696 118	60 657	199 584	35 364	295 605	991 723	96,68	3,32	70,19
Maluku	775 701	19 474	44 015	63 489	839 190	127 257	240 455	82 735	450 447	1 289 637	92,43	7,57	65,07
Maluku Utara	552 502	8 735	21 262	29 997	582 499	79 159	199 182	45 412	323 753	906 252	94,85	5,15	64,28
Papua Barat	459 350	11 553	21 948	33 501	492 851	67 543	123 633	24 642	215 818	708 669	93,20	6,80	69,55
Papua	1 691 745	17 028	58 630	75 658	1 767 403	169 205	422 367	90 170	681 742	2 449 145	95,72	4,28	72,16
Jumlah/*Total*	128 454 184	5 796 692	3 971 062	9 767 754	138 221 938	15 352 639	40 960 652	9 437 231	65 750 522	203 972 460	92,93	7,07	67,77

Catatan/*Note*:

*) Lihat Penjelasan Tabel 01/*Look at Note on Table 01*

https://www.bps.go.id

Tabel / Table 03.1

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu
Population 15 Years of Age and Over by Province and Type of Activity During the Previous Week
(Agustus/August 2019)

Perkotaan+Perdesaan/*Urban+Rural* — Laki-laki+Perempuan/*Male+Female*

Provinsi *Province*	Angkatan Kerja/*Economically Active*					Bukan Angkatan Kerja/*Not Economically Active*				Jumlah *Total*	% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja *% Working to Economically Active*	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) *Unemployment Rate (%)*	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) *% Economically Active to Working Age Population*
	Bekerja *Working*	Pengangguran Terbuka *Unemployment *)*: Pernah Bekerja *Ever Worked*	Pengangguran Terbuka *Unemployment *)*: Tidak Pernah Bekerja *Never Worked*	Pengangguran Terbuka *Unemployment *)*: Jumlah *Total*	Jumlah Angkatan Kerja *Total Economically Active*	Sekolah *Attending School*	Mengurus Rumah Tangga *House Keeping*	Lainnya *Others*	Jumlah *Total*				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	2 219 698	38 459	108 163	146 622	2 366 320	366 433	811 552	190 309	1 368 294	3 734 614	93,80	6,20	63,36
Sumatera Utara	6 681 224	191 274	191 164	382 438	7 063 662	896 494	1 727 347	376 381	3 000 222	10 063 884	94,59	5,41	70,19
Sumatera Barat	2 460 554	60 938	77 521	138 459	2 599 013	393 053	685 347	172 403	1 250 803	3 849 816	94,67	5,33	67,51
Riau	2 996 079	84 774	105 369	190 143	3 186 222	433 719	1 102 823	171 635	1 708 177	4 894 399	94,03	5,97	65,10
Jambi	1 691 782	27 903	46 062	73 965	1 765 747	230 368	568 003	107 813	906 184	2 671 931	95,81	4,19	66,09
Sumatera Selatan	3 968 499	72 720	113 198	185 918	4 154 417	513 966	1 204 189	249 416	1 967 571	6 121 988	95,52	4,48	67,86
Bengkulu	981 095	15 444	18 995	34 439	1 015 534	129 518	253 013	54 813	437 344	1 452 878	96,61	3,39	69,90
Lampung	4 077 930	97 938	73 517	171 455	4 249 385	446 459	1 275 054	179 186	1 900 699	6 150 084	95,97	4,03	69,09
Kepulauan Bangka Belitung	715 927	13 437	13 434	26 871	742 798	82 178	236 071	36 214	354 463	1 097 261	96,38	3,62	67,70
Kepulauan Riau	935 682	46 408	23 071	69 479	1 005 161	144 335	359 131	43 586	547 052	1 552 213	93,09	6,91	64,76
DKI Jakarta	4 836 977	185 198	135 703	320 901	5 157 878	669 463	1 768 476	362 618	2 800 557	7 958 435	93,78	6,22	64,81
Jawa Barat	21 902 958	976 759	924 739	1 901 498	23 804 456	2 805 512	8 472 764	1 501 393	12 779 669	36 584 125	92,01	7,99	65,07
Jawa Tengah	17 441 153	493 576	325 779	819 355	18 260 508	1 917 325	5 167 824	1 266 614	8 351 763	26 612 271	95,51	4,49	68,62
D.I. Yogyakarta	2 134 750	47 371	21 799	69 170	2 203 920	265 781	453 381	98 565	817 727	3 021 647	96,86	3,14	72,94
Jawa Timur	20 655 632	422 084	421 670	843 754	21 499 386	2 238 697	5 943 158	1 277 604	9 459 459	30 958 845	96,08	3,92	69,45
Banten	5 562 846	236 409	254 399	490 808	6 053 654	801 770	2 148 188	379 165	3 329 123	9 382 777	91,89	8,11	64,52
Bali	2 428 679	17 963	19 588	37 551	2 466 230	278 854	489 201	104 482	872 537	3 338 767	98,48	1,52	73,87
Nusa Tenggara Barat	2 387 036	55 121	29 395	84 516	2 471 552	289 990	682 301	156 589	1 128 880	3 600 432	96,58	3,42	68,65
Nusa Tenggara Timur	2 394 673	22 342	60 688	83 030	2 477 703	427 553	563 451	148 432	1 139 436	3 617 139	96,65	3,35	68,50
Kalimantan Barat	2 369 015	50 214	60 058	110 272	2 479 287	296 944	686 639	167 248	1 150 831	3 630 118	95,55	4,45	68,30
Kalimantan Tengah	1 327 885	24 796	31 994	56 790	1 384 675	163 231	391 328	48 004	602 563	1 987 238	95,90	4,10	69,68
Kalimantan Selatan	2 036 736	51 209	40 521	91 730	2 128 466	245 565	591 629	100 946	938 140	3 066 606	95,69	4,31	69,41
Kalimantan Timur	1 704 808	53 096	57 478	110 574	1 815 382	245 422	577 722	93 817	916 961	2 732 343	93,91	6,09	66,44
Kalimantan Utara	333 777	6 609	8 771	15 380	349 157	46 829	110 610	20 227	177 666	526 823	95,60	4,40	66,28
Sulawesi Utara	1 131 521	30 894	44 591	75 485	1 207 006	152 296	432 982	97 601	682 879	1 889 885	93,75	6,25	63,87
Sulawesi Tengah	1 439 759	22 619	24 183	46 802	1 486 561	181 615	442 792	88 350	712 757	2 199 318	96,85	3,15	67,59
Sulawesi Selatan	3 830 096	85 282	115 022	200 304	4 030 400	558 339	1 506 948	311 598	2 376 885	6 407 285	95,03	4,97	62,90
Sulawesi Tenggara	1 217 983	21 008	24 284	45 292	1 263 275	158 091	351 655	55 863	565 609	1 828 884	96,41	3,59	69,07
Gorontalo	562 087	9 537	14 272	23 809	585 896	73 481	184 652	32 706	290 839	876 735	95,94	4,06	66,83
Sulawesi Barat	641 613	11 895	9 159	21 054	662 667	71 383	189 554	33 043	293 980	956 647	96,82	3,18	69,27
Maluku	715 811	14 089	40 486	54 575	770 386	143 821	241 116	66 678	451 615	1 222 001	92,92	7,08	63,04
Maluku Utara	522 423	6 691	20 612	27 303	549 726	85 300	181 640	35 737	302 677	852 403	95,03	4,97	64,49
Papua Barat	433 401	8 721	20 125	28 846	462 247	71 341	120 382	23 128	214 851	677 098	93,76	6,24	68,27
Papua	1 775 030	10 301	56 872	67 173	1 842 203	188 438	293 959	70 287	552 684	2 394 887	96,35	3,65	76,92
Jumlah/*Total*	126 515 119	3 513 079	3 532 682	7 045 761	133 560 880	16 013 564	40 214 882	8 122 451	64 350 897	197 911 777	94,72	5,28	67,49

https://www.bps.go.id

Tabel / Table 03.1

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu
Population 15 Years of Age and Over by Province and Type of Activity During the Previous Week
(Agustus/August 2018)

Perkotaan+Perdesaan/*Urban+Rural* — Laki-laki+Perempuan/*Male+Female*

Provinsi *Province*	Angkatan Kerja/*Economically Active*					Bukan Angkatan Kerja/*Not Economically Active*				Jumlah Total	% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja *% Working to Economically Active*	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) *Unemployment Rate (%)*	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) *% Economically Active to Working Age Population*
	Bekerja *Working*	Pengangguran Terbuka *Unemployment *)*			Jumlah Angkatan Kerja *Total Economically Active*	Sekolah *Attending School*	Mengurus Rumah Tangga *House Keeping*	Lainnya *Others*	Jumlah Total				
		Pernah Bekerja *Ever Worked*	Tidak Pernah Bekerja *Never Worked*	Jumlah Total									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	2.203.717	36.176	113.547	149.723	2.353.440	405.696	734.161	169.953	1.309.810	3.663.250	93,64	6,36	64,24
Sumatera Utara	6.728.431	153.847	242.180	396.027	7.124.458	865.344	1.588.765	341.097	2.795.206	9.919.664	94,44	5,56	71,82
Sumatera Barat	2.410.450	49.311	92.369	141.680	2.552.130	421.945	656.756	163.567	1.242.268	3.794.398	94,45	5,55	67,26
Riau	2.915.597	76.978	115.823	192.801	3.108.398	430.110	1.076.566	150.362	1.657.038	4.765.436	93,80	6,20	65,23
Jambi	1.721.362	25.225	43.850	69.075	1.790.437	202.141	527.061	95.651	824.853	2.615.290	96,14	3,86	68,46
Sumatera Selatan	3.963.870	71.424	103.663	175.087	4.138.957	497.672	1.154.127	235.150	1.886.949	6.025.906	95,77	4,23	68,69
Bengkulu	963.463	15.352	19.709	35.061	998.524	139.441	239.583	47.682	426.706	1.425.230	96,49	3,51	70,06
Lampung	4.060.377	86.096	85.593	171.689	4.232.066	423.093	1.230.800	188.730	1.842.623	6.074.689	95,94	4,06	69,67
Bangka Belitung	701.366	14.649	11.903	26.552	727.918	81.716	226.808	37.419	345.943	1.073.861	96,35	3,65	67,79
Kepulauan Riau	901.019	38.290	30.823	69.113	970.132	133.156	346.678	49.093	528.927	1.499.059	92,88	7,12	64,72
DKI Jakarta	4.726.779	138.511	176.330	314.841	5.041.620	696.361	1.723.008	423.030	2.842.399	7.884.019	93,76	6,24	63,95
Jawa Barat	20.779.888	918.640	929.594	1.848.234	22.628.122	3.036.782	8.985.323	1.312.958	13.335.063	35.963.185	91,83	8,17	62,92
Jawa Tengah	17.245.548	472.352	341.995	814.347	18.059.895	2.162.301	4.918.746	1.200.602	8.281.649	26.341.544	95,49	4,51	68,56
D.I. Yogyakarta	2.118.392	43.004	30.346	73.350	2.191.742	247.191	452.310	96.087	795.588	2.987.330	96,65	3,35	73,37
Jawa Timur	20.449.949	422.282	428.192	850.474	21.300.423	2.327.947	5.899.262	1.176.853	9.404.062	30.704.485	96,01	3,99	69,37
Banten	5.332.496	221.613	275.119	496.732	5.829.228	875.123	2.098.139	378.244	3.351.506	9.180.734	91,48	8,52	63,49
Bali	2.490.870	17.349	17.136	34.485	2.525.355	255.929	423.083	84.541	763.553	3.288.908	98,63	1,37	76,78
Nusa Tenggara Barat	2.154.124	44.012	39.245	83.257	2.237.381	234.977	742.147	179.933	1.157.057	3.394.438	96,28	3,72	65,91
Nusa Tenggara Timur	2.411.533	20.238	54.510	74.748	2.486.281	388.407	547.798	120.633	1.056.838	3.543.119	96,99	3,01	70,17
Kalimantan Barat	2.346.881	48.770	55.748	104.518	2.451.399	286.333	697.165	135.885	1.119.383	3.570.782	95,74	4,26	68,65
Kalimantan Tengah	1.301.002	26.006	28.391	54.397	1.355.399	142.306	388.927	48.688	579.921	1.935.320	95,99	4,01	70,03
Kalimantan Selatan	2.021.666	48.952	46.326	95.278	2.116.944	226.018	570.694	98.741	895.453	3.012.397	95,50	4,50	70,27
Kalimantan Timur	1.618.285	55.372	58.941	114.313	1.732.598	238.947	593.523	100.841	933.311	2.665.909	93,40	6,60	64,99
Kalimantan Utara	323.400	9.168	8.629	17.797	341.197	45.089	98.718	18.143	161.950	503.147	94,78	5,22	67,81
Sulawesi Utara	1.095.145	28.193	52.471	80.664	1.175.809	143.337	441.804	105.105	690.246	1.866.055	93,14	6,86	63,01
Sulawesi Tengah	1.451.491	24.092	27.389	51.481	1.502.972	195.248	401.321	62.329	658.898	2.161.870	96,57	3,43	69,52
Sulawesi Selatan	3.774.924	83.858	129.247	213.105	3.988.029	615.134	1.431.526	293.890	2.340.550	6.328.579	94,66	5,34	63,02
Sulawesi Tenggara	1.207.488	20.711	20.013	40.724	1.248.212	165.099	318.807	56.757	540.663	1.788.875	96,74	3,26	69,78
Gorontalo	555.533	6.982	16.365	23.347	578.880	69.552	182.091	29.078	280.721	859.601	95,97	4,03	67,34
Sulawesi Barat	619.395	9.732	10.495	20.227	639.622	86.869	176.342	31.448	294.659	934.281	96,84	3,16	68,46
Maluku	700.143	8.280	46.611	54.891	755.034	152.272	236.457	56.631	445.360	1.200.394	92,73	7,27	62,90
Maluku Utara	515.615	4.841	20.990	25.831	541.446	87.421	166.527	34.913	288.861	830.307	95,23	4,77	65,21
Papua Barat	417.544	6.909	21.177	28.086	445.630	77.322	116.418	17.147	210.887	656.517	93,70	6,30	67,88
Papua	1.777.207	10.730	48.026	58.756	1.835.963	176.043	256.249	52.607	484.899	2.320.862	96,80	3,20	79,11
Jumlah/*Total*	124.004.950	3.257.945	3.742.746	7.000.691	131.005.641	16.532.322	39.647.690	7.593.788	63.773.800	194.779.441	94,66	5,34	67,26

Catatan/*Note*:

*) Lihat Penjelasan Tabel 01/*Look at Note on Table 01*

https://www.bps.go.id

Tabel 03.1
Table

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu
Population 15 Years of Age and Over by Province and Type of Activity During the Previous Week
(Agustus/August 2017)

Perkotaan+Perdesaan/*Urban+Rural*

Laki-laki+Perempuan/*Male+Female*

Provinsi *Province*	Angkatan Kerja/*Economically Active*					Bukan Angkatan Kerja/*Not Economically Active*				Jumlah *Total*	% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja *% Working to Economically Active*	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) *Unemployment Rate (%)*	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) *% Economically Active to Working Age Population*
	Bekerja *Working*	Pengangguran Terbuka *Unemployment *)*			Jumlah Angkatan Kerja *Total Economically Active*	Sekolah *Attending School*	Mengurus Rumah Tangga *House Keeping*	Lainnya *Others*	Jumlah *Total*				
		Pernah Bekerja *Ever Worked*	Tidak Pernah Bekerja *Never Worked*	Jumlah *Total*									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	2 138 512	26 498	123 767	150 265	2 288 777	399 936	730 785	171 327	1 302 048	3 590 825	93,43	6,57	63,74
Sumatera Utara	6 365 989	114 283	263 005	377 288	6 743 277	920 846	1 736 921	388 319	3 046 086	9 789 363	94,40	5,60	68,88
Sumatera Barat	2 344 972	40 861	97 842	138 703	2 483 675	418 369	692 806	151 980	1 263 155	3 746 830	94,42	5,58	66,29
Riau	2 781 021	69 084	115 480	184 564	2 965 585	476 060	1 059 698	132 698	1 668 456	4 634 041	93,78	6,22	64,00
Jambi	1 657 817	19 300	47 516	66 816	1 724 633	222 486	520 476	86 800	829 762	2 554 395	96,13	3,87	67,52
Sumatera Selatan	3 942 534	67 064	114 071	181 135	4 123 669	501 367	1 103 809	204 910	1 810 086	5 933 755	95,61	4,39	69,50
Bengkulu	932 976	12 083	24 196	36 279	969 255	138 443	243 931	46 913	429 287	1 398 542	96,26	3,74	69,30
Lampung	3 896 230	78 809	97 448	176 257	4 072 487	440 174	1 312 160	178 881	1 931 215	6 003 702	95,67	4,33	67,83
Bangka Belitung	672 618	12 707	13 692	26 399	699 017	80 170	235 882	32 614	348 666	1 047 683	96,22	3,78	66,72
Kepulauan Riau	896 931	47 110	22 050	69 160	966 091	140 060	304 775	43 843	488 678	1 454 769	92,84	7,16	66,41
DKI Jakarta	4 509 171	132 729	214 216	346 945	4 856 116	879 520	1 734 211	366 557	2 980 288	7 836 404	92,86	7,14	61,97
Jawa Barat	20 551 575	746 649	1 092 779	1 839 428	22 391 003	3 023 092	8 533 516	1 405 580	12 962 188	35 353 191	91,78	8,22	63,34
Jawa Tengah	17 186 674	416 643	407 295	823 938	18 010 612	1 862 456	5 004 910	1 184 025	8 051 391	26 062 003	95,43	4,57	69,11
D.I. Yogyakarta	2 053 168	36 218	27 801	64 019	2 117 187	266 870	472 108	104 039	843 017	2 960 204	96,98	3,02	71,52
Jawa Timur	20 099 220	363 970	474 526	838 496	20 937 716	2 166 390	6 128 185	1 210 867	9 505 442	30 443 158	96,00	4,00	68,78
Banten	5 077 400	203 181	316 382	519 563	5 596 963	852 098	2 132 938	398 509	3 383 545	8 980 508	90,72	9,28	62,32
Bali	2 398 307	18 727	17 416	36 143	2 434 450	271 524	433 302	96 287	801 113	3 235 563	98,52	1,48	75,24
Nusa Tenggara Barat	2 316 720	47 404	32 045	79 449	2 396 169	273 340	695 307	133 583	1 102 230	3 498 399	96,68	3,32	68,49
Nusa Tenggara Timur	2 320 061	15 573	62 975	78 548	2 398 609	377 245	562 544	133 458	1 073 247	3 471 856	96,73	3,27	69,09
Kalimantan Barat	2 303 198	43 505	61 556	105 061	2 408 259	300 706	665 919	134 000	1 100 625	3 508 884	95,64	4,36	68,63
Kalimantan Tengah	1 222 707	16 820	37 142	53 962	1 276 669	166 757	392 073	49 258	608 088	1 884 757	95,77	4,23	67,74
Kalimantan Selatan	1 975 161	47 631	51 325	98 956	2 074 117	235 301	557 717	93 266	886 284	2 960 401	95,23	4,77	70,06
Kalimantan Timur	1 540 675	49 390	64 899	114 289	1 654 964	247 456	612 093	81 479	941 028	2 595 992	93,09	6,91	63,75
Kalimantan Utara	312 416	8 064	10 251	18 315	330 731	44 918	95 302	13 693	153 913	484 644	94,46	5,54	68,24
Sulawesi Utara	1 040 826	20 413	60 070	80 483	1 121 309	161 085	458 024	102 382	721 491	1 842 800	92,82	7,18	60,85
Sulawesi Tengah	1 374 214	22 294	32 075	54 369	1 428 583	197 419	438 646	63 210	699 275	2 127 858	96,19	3,81	67,14
Sulawesi Selatan	3 598 663	70 182	143 513	213 695	3 812 358	591 675	1 538 291	309 053	2 439 019	6 251 377	94,39	5,61	60,98
Sulawesi Tenggara	1 160 974	13 648	25 983	39 631	1 200 605	162 205	331 001	53 733	546 939	1 747 544	96,70	3,30	68,70
Gorontalo	524 316	10 383	13 067	23 450	547 766	76 421	191 902	29 475	297 798	845 564	95,72	4,28	64,78
Sulawesi Barat	595 004	6 733	13 011	19 744	614 748	81 994	187 852	33 506	303 352	918 100	96,79	3,21	66,96
Maluku	642 061	7 490	58 245	65 735	707 796	167 704	248 960	51 656	468 320	1 176 116	90,71	9,29	60,18
Maluku Utara	488 715	8 039	19 477	27 516	516 231	87 709	177 966	29 161	294 836	811 067	94,67	5,33	63,65
Papua Barat	402 526	7 227	20 725	27 952	430 478	78 695	106 853	21 984	207 532	638 010	93,51	6,49	67,47
Papua	1 699 071	7 212	56 558	63 770	1 762 841	181 879	278 056	68 335	528 270	2 291 111	96,38	3,62	76,94
Jumlah/*Total*	121 022 423	2 807 924	4 232 399	7 040 323	128 062 746	16 492 370	39 918 919	7 605 381	64 016 670	192 079 416	94,50	5,50	66,67

Catatan/*Note*:

https://www.bps.go.id

Tabel 03.1
Table

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu
Population 15 Years of Age and Over by Province and Type of Activity During the Previous Week
(Agustus/August 2016)

Perkotaan+Perdesaan/*Urban+Rural*

Laki-laki+Perempuan/*Male+Female*

Provinsi *Province*	Angkatan Kerja/*Economically Active*					Bukan Angkatan Kerja/*Not Economically Active*				Jumlah *Total*	% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja *% Working to Economically Active*	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) *Unemployment Rate (%)*	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) *% Economically Active to Working Age Population*
	Bekerja *Working*	Pengangguran Terbuka *Unemployment *)*			Jumlah Angkatan Kerja *Total Economically Active*	Sekolah *Attending School*	Mengurus Rumah Tangga *House Keeping*	Lainnya *Others*	Jumlah *Total*				
		Pernah Bekerja *Ever Worked*	Tidak Pernah Bekerja *Never Worked*	Jumlah *Total*									
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	2 087 045	46 628	124 270	170 898	2 257 943	366 892	715 618	173 512	1 256 022	3 513 965	92,43	7,57	64,26
Sumatera Utara	5 991 229	155 250	216 430	371 680	6 362 909	853 283	1 824 049	601 651	3 278 983	9 641 892	94,16	5,84	65,99
Sumatera Barat	2 347 911	69 049	56 854	125 903	2 473 814	360 250	690 680	163 382	1 214 312	3 688 126	94,91	5,09	67,08
Riau	2 765 946	91 516	130 490	222 006	2 987 952	409 972	990 002	121 982	1 521 956	4 509 908	92,57	7,43	66,25
Jambi	1 624 522	29 429	38 242	67 671	1 692 193	213 062	497 819	102 476	813 357	2 505 550	96,00	4,00	67,54
Sumatera Selatan	3 998 637	97 605	82 552	180 157	4 178 794	460 828	963 990	233 839	1 658 657	5 837 451	95,69	4,31	71,59
Bengkulu	964 971	15 427	17 515	32 942	997 913	122 114	210 081	42 669	374 864	1 372 777	96,70	3,30	72,69
Lampung	3 931 321	108 277	82 070	190 347	4 121 668	437 611	1 194 514	167 389	1 799 514	5 921 182	95,38	4,62	69,61
Bangka Belitung	686 830	11 517	6 826	18 343	705 173	66 849	216 542	34 391	317 782	1 022 955	97,40	2,60	68,93
Kepulauan Riau	859 813	45 007	26 615	71 622	931 435	123 308	331 681	26 348	481 337	1 412 772	92,31	7,69	65,93
DKI Jakarta	4 861 832	208 467	108 540	317 007	5 178 839	650 644	1 604 980	305 422	2 561 046	7 739 885	93,88	6,12	66,91
Jawa Barat	19 202 038	941 581	932 280	1 873 861	21 075 899	3 136 149	8 725 263	1 810 007	13 671 419	34 747 318	91,11	8,89	60,65
Jawa Tengah	16 511 136	458 817	342 513	801 330	17 312 466	1 866 447	5 240 132	1 363 854	8 470 433	25 782 899	95,37	4,63	67,15
D.I. Yogyakarta	2 042 400	37 580	19 456	57 036	2 099 436	273 286	430 895	114 035	818 216	2 917 652	97,28	2,72	71,96
Jawa Timur	19 114 563	369 541	469 742	839 283	19 953 846	2 318 810	6 591 198	1 304 768	10 214 776	30 168 622	95,79	4,21	66,14
Banten	5 088 497	284 723	213 873	498 596	5 587 093	722 542	2 066 866	399 483	3 188 891	8 775 984	91,08	8,92	63,66
Bali	2 416 555	27 245	19 239	46 484	2 463 039	220 448	415 510	90 021	725 979	3 189 018	98,11	1,89	77,24
Nusa Tenggara Barat	2 367 310	61 147	35 874	97 021	2 464 331	306 812	546 728	125 577	979 117	3 443 448	96,06	3,94	71,57
Nusa Tenggara Timur	2 277 068	17 949	58 631	76 580	2 353 648	427 049	504 889	116 489	1 048 427	3 402 075	96,75	3,25	69,18
Kalimantan Barat	2 287 823	50 165	50 770	100 935	2 388 758	295 662	637 486	124 251	1 057 399	3 446 157	95,77	4,23	69,32
Kalimantan Tengah	1 248 189	25 193	38 045	63 238	1 311 427	157 465	334 825	35 494	527 784	1 839 211	95,18	4,82	71,30
Kalimantan Selatan	1 965 088	71 044	42 252	113 296	2 078 384	224 464	504 888	96 110	825 462	2 903 846	94,55	5,45	71,57
Kalimantan Timur	1 581 239	71 592	65 061	136 653	1 717 892	203 316	535 158	77 747	816 221	2 534 113	92,05	7,95	67,79
Kalimantan Utara	273 423	7 890	7 209	15 099	288 522	48 562	112 516	12 751	173 829	462 351	94,77	5,23	62,40
Sulawesi Utara	1 110 564	26 282	46 875	73 157	1 183 721	149 871	382 425	102 145	634 441	1 818 162	93,82	6,18	65,11
Sulawesi Tengah	1 459 803	32 849	16 853	49 702	1 509 505	158 482	349 082	71 244	578 808	2 088 313	96,71	3,29	72,28
Sulawesi Selatan	3 694 712	75 775	110 516	186 291	3 881 003	578 786	1 372 535	335 631	2 286 952	6 167 955	95,20	4,80	62,92
Sulawesi Tenggara	1 219 548	14 988	19 088	34 076	1 253 624	150 079	267 604	35 083	452 766	1 706 390	97,28	2,72	73,47
Gorontalo	546 668	3 814	11 714	15 528	562 196	75 928	168 119	21 888	265 935	828 131	97,24	2,76	67,89
Sulawesi Barat	624 182	9 314	12 175	21 489	645 671	62 178	165 200	24 915	252 293	897 964	96,67	3,33	71,90
Maluku	690 786	12 214	40 149	52 363	743 149	140 278	211 343	57 192	408 813	1 151 962	92,95	7,05	64,51
Maluku Utara	503 479	2 809	18 238	21 047	524 526	83 051	154 486	30 415	267 952	792 478	95,99	4,01	66,19
Papua Barat	402 360	13 199	19 258	32 457	434 817	61 916	109 514	14 501	185 931	620 748	92,54	7,46	70,05
Papua	1 664 485	6 302	51 375	57 677	1 722 162	195 635	268 585	59 080	523 300	2 245 462	96,65	3,35	76,70
Jumlah/*Total*	118 411 973	3 500 185	3 531 590	7 031 775	125 443 748	15 922 029	39 335 203	8 395 742	63 652 974	189 096 722	94,39	5,61	66,34

http://www.bps.go.id

Tabel / Table 03.1

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang lalu
Population 15 Years of Age and Over by Province and Type of Activity During the Previous Week
(Agustus/*August* 2015)

Perkotaan+Perdesaan/*Urban+Rural* — Laki-laki+Perempuan/*Male+Female*

Provinsi *Province*	Angkatan Kerja/*Economically Active*					Bukan Angkatan Kerja/*Not Economically Active*				Jumlah *Total*	% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja *% Working to Economically Active*	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) *Unemployment Rate (%)*	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK) *% Economically Active to Working Age Population*
		Pengangguran Terbuka *Unemployment *)*											
	Bekerja *Working*	Pernah Bekerja *Ever Worked*	Tidak Pernah Bekerja *Never Worked*	Jumlah *Total*	Jumlah Angkatan Kerja *Total Economically Active*	Sekolah *Attending School*	Mengurus Rumah Tangga *House Keeping*	Lainnya *Others*	Jumlah *Total*				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	1 966 018	34 685	182 121	216 806	2 182 824	420 955	658 268	178 587	1 257 810	3 440 634	90,07	9,93	63,44
Sumatera Utara	5 962 304	156 213	272 581	428 794	6 391 098	980 664	1 661 466	465 746	3 107 876	9 498 974	93,29	6,71	67,28
Sumatera Barat	2 184 599	65 154	96 410	161 564	2 346 163	414 955	672 483	200 635	1 288 073	3 634 236	93,11	6,89	64,56
Riau	2 554 296	72 723	144 330	217 053	2 771 349	449 952	1 000 793	161 456	1 612 201	4 383 550	92,17	7,83	63,22
Jambi	1 550 403	25 944	44 405	70 349	1 620 752	223 169	497 410	109 133	829 712	2 450 464	95,66	4,34	66,14
Sumatera Selatan	3 695 866	81 151	157 770	238 921	3 934 787	500 481	1 057 043	248 997	1 806 521	5 741 308	93,93	6,07	68,53
Bengkulu	904 317	17 753	28 937	46 690	951 007	144 917	209 219	40 611	394 747	1 345 754	95,09	4,91	70,67
Lampung	3 635 258	68 846	128 004	196 850	3 832 108	469 345	1 318 560	221 952	2 009 857	5 841 965	94,86	5,14	65,60
Bangka Belitung	623 949	21 131	20 762	41 893	665 842	75 602	220 803	35 873	332 278	998 120	93,71	6,29	66,71
Kepulauan Riau	836 670	34 865	20 453	55 318	891 988	127 128	315 775	35 998	478 901	1 370 889	93,80	6,20	65,07
DKI Jakarta	4 724 029	215 179	153 011	368 190	5 092 219	686 419	1 554 836	337 113	2 578 368	7 670 587	92,77	7,23	66,39
Jawa Barat	18 791 482	838 647	956 227	1 794 874	20 586 356	3 090 504	8 555 422	1 885 201	13 531 127	34 117 483	91,28	8,72	60,34
Jawa Tengah	16 435 142	456 097	407 686	863 783	17 298 925	1 976 376	4 896 482	1 320 680	8 193 538	25 492 463	95,01	4,99	67,86
D.I. Yogyakarta	1 891 218	41 732	38 513	80 245	1 971 463	297 972	475 397	138 148	911 517	2 882 980	95,93	4,07	68,38
Jawa Timur	19 367 777	416 030	490 874	906 904	20 274 681	2 302 395	5 924 108	1 383 661	9 610 164	29 884 845	95,53	4,47	67,84
Banten	4 825 460	237 740	271 643	509 383	5 334 843	796 515	2 022 225	418 007	3 236 747	8 571 590	90,45	9,55	62,24
Bali	2 324 805	28 927	18 283	47 210	2 372 015	243 189	427 238	98 843	769 270	3 141 285	98,01	1,99	75,51
Nusa Tenggara Barat	2 127 503	67 019	61 357	128 376	2 255 879	330 094	650 588	153 523	1 134 205	3 390 084	94,31	5,69	66,54
Nusa Tenggara Timur	2 219 291	16 524	71 922	88 446	2 307 737	406 687	479 617	138 359	1 024 663	3 332 400	96,17	3,83	69,25
Kalimantan Barat	2 235 887	49 762	71 575	121 337	2 357 224	318 090	565 881	141 971	1 025 942	3 383 166	94,85	5,15	69,68
Kalimantan Tengah	1 214 681	27 013	30 767	57 780	1 272 461	154 969	314 349	47 738	517 056	1 789 517	95,46	4,54	71,11
Kalimantan Selatan	1 889 502	50 088	47 660	97 748	1 987 250	218 371	532 584	111 824	862 779	2 850 029	95,08	4,92	69,73
Kalimantan Timur	1 423 957	46 431	69 103	115 534	1 539 491	272 331	560 800	94 889	928 020	2 467 511	92,50	7,50	62,39
Kalimantan Utara	267 023	6 023	10 056	16 079	283 102	51 145	93 017	18 906	163 068	446 170	94,32	5,68	63,45
Sulawesi Utara	1 000 032	35 413	63 827	99 240	1 099 272	168 465	427 374	98 594	694 433	1 793 705	90,97	9,03	61,28
Sulawesi Tengah	1 327 418	19 760	37 057	56 817	1 384 235	165 217	419 334	81 706	666 257	2 050 492	95,90	4,10	67,51
Sulawesi Selatan	3 485 492	69 716	150 920	220 636	3 706 128	640 269	1 380 100	355 378	2 375 747	6 081 875	94,05	5,95	60,94
Sulawesi Tenggara	1 074 916	22 086	41 043	63 129	1 138 045	172 953	295 681	58 416	527 050	1 665 095	94,45	5,55	68,35
Gorontalo	493 687	12 679	11 422	24 101	517 788	78 825	185 526	31 367	295 718	813 506	95,35	4,65	63,65
Sulawesi Barat	595 905	7 389	13 255	20 644	616 549	78 687	153 303	28 905	260 895	877 444	96,65	3,35	70,27
Maluku	655 063	10 437	61 759	72 196	727 259	146 021	203 186	51 671	400 878	1 128 137	90,07	9,93	64,47
Maluku Utara	482 543	8 208	22 850	31 058	513 601	84 274	149 468	25 838	259 580	773 181	93,95	6,05	66,43
Papua Barat	380 226	11 623	21 786	33 409	413 635	73 078	95 075	20 460	188 613	602 248	91,92	8,08	68,68
Papua	1 672 480	11 109	58 356	69 465	1 741 945	174 949	230 290	42 046	447 285	2 189 230	96,01	3,99	79,57
Jumlah/*Total*	114 819 199	3 284 097	4 276 725	7 560 822	122 380 021	16 734 963	38 203 701	8 782 232	63 720 896	186 100 917	93,82	6,18	65,76

Catatan/*Note*:

http://www.bps.go.id

Lampiran IV

Hasil Analisis Olahan Data SPSS version 26

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,633[a]	,400	,356	65,803	,766

a. Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah Penduduk

b. Dependent Variable: Pengangguran

b. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000000
	Std. Deviation	63,49305405
Most Extreme Differences	Absolute	,128
	Positive	,128
	Negative	-,077
Test Statistic		,128
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200[c,d]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

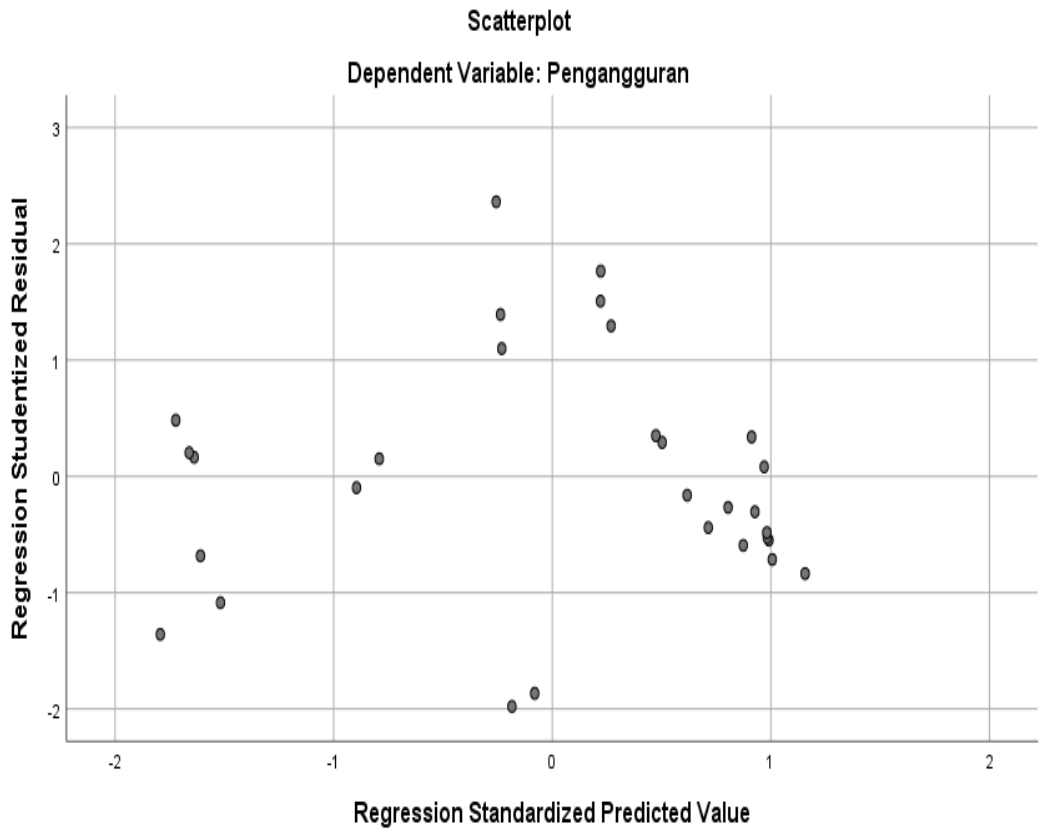
c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

c. Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Jumlah Penduduk	,159	6,295
	Inflasi	,159	6,295

d. Uji heteroskedastisitas



2. Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	917,418	729,609	
	Jumlah Penduduk	-19,990	21,123	-,354
	Inflasi	30,646	12,174	,941

3. Uji koefisen determinasi (R square)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,633[a]	,400	,356

4. Uji Hipotesis Parsial (Uji-t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	917,418	729,609		1,257	,219
	Jumlah Penduduk	-19,990	21,123	-,354	-,946	,352
	Inflasi	30,646	12,174	,941	2,517	,018

5. Uji Hipotesis Simultan (Uji-f)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	78028,755	2	39014,377	9,010	,001[b]
	Residual	116909,669	27	4329,988		
	Total	194938,424	29			

a. Dependent Variable: Pengangguran

b. Predictors: (Constant), Inflasi, Jumlah Penduduk

T tabel

cum. Prob		$t_{.50}$	$t_{.75}$	$t_{.80}$	$t_{.85}$	$t_{.90}$	$t_{.95}$	$t_{.975}$
one-tail		**0.50**	**0.25**	**0.20**	**0.15**	**0.10**	**0.05**	**0.025**
two-tails		**1.00**	**0.50**	**0.40**	**0.30**	**0.20**	**0.10**	**0.05**
Df								
1		0.000	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71
2		0.000	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303
3		0.000	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182
4		0.000	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776
5		0.000	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571
6		0.000	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447
7		0.000	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365
8		0.000	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306
9		0.000	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.262
10		0.000	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.228
11		0.000	0.697	0.876	1.088	1.363	1.796	2.201
12		0.000	0.695	0.873	1.083	1.356	1.782	2.179
13		0.000	0.694	0.870	1.079	1.350	1.771	2.160
14		0.000	0.692	0.868	1.076	1.345	1.761	2.145
15		0.000	0.691	0.866	1.074	1.341	1.753	2.131
16		0.000	0.690	0.865	1.071	1.337	1.746	2.120
17		0.000	0.689	0.863	1.069	1.333	1.740	2.110
18		0.000	0.688	0.862	1.067	1.330	1.734	2.101
19		0.000	0.688	0.861	1.066	1.328	1.729	2.093
20		0.000	0.687	0.860	1.064	1.325	1.725	2.086
21		0.000	0.686	0.859	1.063	1.323	1.721	2.080
22		0.000	0.686	0.858	1.061	1.321	1.717	2.074
23		0.000	0.685	0.858	1.060	1.319	1.714	2.069
24		0.000	0.685	0.857	1.059	1.318	1.711	2.064
25		0.000	0.684	0.856	1.058	1.316	1.708	2.060
26		0.000	0.684	0.856	1.058	1.315	1.706	2.056
27		0.000	0.684	0.855	1.057	1.314	1.703	2.052
28		0.000	0.683	0.855	1.056	1.313	1.701	2.048
29		0.000	0.683	0.854	1.055	1.311	1.699	2.045
30		0.000	0.683	0.854	1.055	1.310	1.697	2.042
40		0.000	0.681	0.851	1.050	1.303	1.684	2.021
60		0.000	0.679	0.848	1.045	1.296	1.671	2.000
80		0.000	0.678	0.846	1.043	1.292	1.664	1.990
100		0.000	0.677	0.845	1.042	1.290	1.660	1.984
1000		0.000	0.675	0.842	1.037	1.282	1.646	1.962
Z		0.000	0.674	0.842	1.036	1.282	1.645	1.960
		0%	50%	60%	70%	80%	90%	95%
							Confidence Level	

F tabel

df untuk penyebut (N2)	df untuk pembilang (N1)														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245	246
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42	19.43
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71	8.70
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87	5.86
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64	4.62
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96	3.94
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53	3.51
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24	3.22
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03	3.01
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86	2.85
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74	2.72
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64	2.62
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55	2.53
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48	2.46
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42	2.40
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37	2.35
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33	2.31
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29	2.27
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26	2.23
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22	2.20
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20	2.18
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17	2.15
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15	2.13
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13	2.11
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11	2.09
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09	2.07
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08	2.06
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06	2.04
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05	2.03
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04	2.01
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03	2.00
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01	1.99
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00	1.98
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99	1.97
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99	1.96
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98	1.95
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97	1.95
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96	1.94
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95	1.93
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95	1.92
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94	1.92
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94	1.91
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93	1.91
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92	1.90
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92	1.89

Lampiran V

Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Biodata Penulis :

Nama : Ismail

NIM : 3218157

Tempat Lahir : Bukittinggi 19 April 1999

Agama : Islam

Anak ke : 2 (2 Saudara)

Alamat :Jorong Tobo Ladang, Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Nama Orang Tua

Ayah : Syafril

Ibu : Nelisma

Riwayat Pendidikan :

1. SD N 08 Pakan Sinayan Tahun 2005 – 2011.
2. SMP N 1 IV Koto Tahun 2011 – 2014.
3. SMA N 1 Banuhampu Tahun 2014 – 2017.
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun2018 – 2022.